

LAPORAN TAHUNAN

**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2023 telah terselesaikan penyusunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Tahunan ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pada tahun 2023, yang dibuat untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan diharapkan dapat memberikan perubahan dalam mewujudkan kepercayaan publik, dimana Badan Pengawasan telah berupaya secara transparan dan optimal dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik.

Laporan Tahunan Badan Pengawasan Tahun 2023 kiranya dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Pengawasan serta memberikan gambaran dalam upaya nyata melakukan pembenahan terhadap tertib pelaksanaan tugas yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh aparatur Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas khususnya berkaitan dengan pelayanan penanganan pengaduan dan terwujudnya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas dari KKN.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Umum.....	1
B. Visi dan Misi	1
C. Rencana Strategis	2
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
A. Standard Operational Procedures (SOP)	10
B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	12
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	13
A. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	65
C. Pengelolaan Keuangan	85
BAB IV. PENGAWASAN	90
A. Program Pembaruan	90
1.Pengembangan Aplikasi Semar (Sosialisasi Aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja.....	90
2.Pengembangan Aplikasi SIYANTO (Sistem Infromasi Pelayanan Konsultasi Online	91
3.Pengembangan Aplikasi SIRISMA (Sistem Infromasi Pelayanan Risk Manajemen	92
4.Pengembangan Aplikasi MaSugi (Manajemen Amplop Surat Terintegrasi	93
B. Penguatan Sistem Pengawasan	94
1. Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	94
2. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan.....	97
3. Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung	98
C. Pengelolaan Sistem Pengawasan	100

1. Penanganan Pengaduan.....	100
2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim	101
3. Penjatuhan Hukuman Disiplin.....	102
4. Pemeriksaan Reguler	104
5. Pemeriksaan (<i>Monitoring</i>)Kegiatan Pemeriksaan	104
6. Pemeriksaan Audit Kinerja.....	106
7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	112
8. Penilaian Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM).....	117
9. Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)...	121
D. Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	122
E. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	127
F. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MA RI)	128
G. Capaian Kinerja Badan Pengawasan MA RI	128
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	130
A. Kesimpulan	130
B. Rekomendasi	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting, sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan dalam mendorong terwujudnya kepercayaan publik kepada badan peradilan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung mempunyai kinerja utama berupa penanganan pengaduan, dimana salah satu penunjang keberhasilan penanganan pengaduan tersebut adalah adanya dukungan Teknologi Informasi yang terintegrasi dari pusat sampai pada Satuan Kerja di daerah yang dikenal dengan Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. Visi dan Misi

Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dan dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut Badan Pengawasan telah menetapkan Visi yaitu ***”Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”***.

Yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pengawasan Melekat Dan Mengintensifkan Pengawasan Fungsional Yang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Pengawasan dan Peradilan Tingkat Banding di Bidang Pengawasan;
3. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

4. Meningkatkan Aparatur Yang Profesional, Bersih, Netral, Bertanggungjawab Dan Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat.

C. Rencana Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 5 tahun yang dijabarkan tiap tahunnya dalam kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Rencana Strategis Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

No.	Tujuan		Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa	Persentase kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	95%	100%	100%	100%	100%
				Penanganan pengaduan tepat waktu			90%	90%	90%
				Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	0	189 70%	95%	95%	95%
			2. Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	-	-	80%	80%	80%
				Persentase rekomendasi hasil eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	90%	90%	90%
				Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	-	-	80%	80%	80%
			3. Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan Pengawasan Reguler	-	-	81 LHP	81 LHP	81 LHP
				Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan Audit Kinerja	-	-	73 LHP	73 LHP	73 LHP
				Pengadilan yang dilakukan Audit PBJ	-	-	5 LHP	5 LHP	5 LHP
				Satuan Kerja yang dilakukan Pemeriksaan Keuangan	-	-	8 LHP	8 LHP	8 LHP
				Evaluasi LKJIP yang selesai dilakukan	-	-	9 LHP	9 LHP	9 LHP
				Peningkatan Zona Integritas	-	-	158 LHP	158 LHP	158 LHP
				Pemeriksaan Probitiy	-	-	10 LHP	10 LHP	10 LHP
				Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	-	-	2 Kegiat an	2 Kegiat an	2 Kegiat an
				Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	-	-	2 Kegiat an	2 Kegiat an	2 Kegiat an
				Pegawai yang mengikuti Assessment	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang

				Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	-	-	2 Kegiat an	2 Kegiat an	2 Kegiat an
				Sidang Majelis Kehormatan Hakim	-	-	20 LHP	20 LHP	20 LHP

BAB II STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, struktur organisasi badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri dari:

1. ESELON I

Badan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

2. ESELON II

Susunan Organisasi Eselon II Badan Pengawasan terdiri dari:

A. Sekretaris Badan Pengawasan

Sekretariat Badan Pengawasan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- 4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

B. Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Sumatera yang meliputi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;

- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat wilayah I.

C. Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Jawa dan Bali yang meliputi: Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat wilayah II.

D. Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat wilayah III.

E. Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah Nusa Tenggara dan Papua yang meliputi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- 5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat wilayah IV.

3. ESELON III

Organisasi Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Eselon II), yang didukung dengan Jabatan Struktural dibawahnya yang meliputi:

a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan Laporan Keuangan dan verifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
- 2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;

3) Sub Bagian Akuntansi.

b. Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3), administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Mutasi;
- 3) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh pejabat struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi serta penyusunan laporan;
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi;
- 3) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

d. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh pejabat struktural Eselon III yang bertugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- 2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.

A. Standard Operational Procedures (SOP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2023 telah melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna melengkapi dan menambahkan SOP baru berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu:

SOP Baru

- 1. SOP Kenaikan Golongan Pangkat pada Badan Pengawasan**
- 2. SOP Monitoring Evaluasi Bappenas**
- 3. SOP Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawasan**
- 4. SOP Peminjam Ruangan**
- 5. SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional**
- 6. SOP Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional (Daring)**
- 7. SOP Pengelolaan Surat Masuk**
- 8. SOP Pengelolaan Surat Keluar**

MONEV SOP

- 1. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**
- 2. SOP Penanganan Administrasi Cuti**
- 3. SOP Penanganan Administrasi Daftar Hadir**
- 4. SOP Belanja Pegawai dan Kekurangannya**
- 5. SOP Laporan Keuangan SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)**
- 6. SOP Monitoring Evaluasi Anggaran SMART DJA**

- 7. SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas**
- 8. SOP Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)**
- 9. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja**
- 10. SOP Penyusunan Program Kerja Tahunan**
- 11. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara Lembaga (RKA-KL)**
- 12. SOP Penyusunan Renstra**
- 13. SOP Permintaan Uang Makan**
- 14. SOP Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP Tunai dan UP
KKP)**
- 15. SOP Layanan Perpustakaan**
- 16. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan**
- 17. SOP Penayangan Data dan Informasi pada Website**
- 18. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan**
- 19. SOP Pengelolaan Arsip LHP**
- 20. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengawasan**
- 21. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung**
- 22. SOP Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan**
- 23. SOP Penyusunan LKjIP Mahkamah Agung RI**
- 24. SOP Inventarisasi Sarana dan Prasarana**
- 25. SOP Pelayanan Meja Pengaduan Khusus Informasi Pengaduan**
- 26. SOP Pelayanan Meja Pengaduan Khusus Menerima Laporan
Pengaduan**
- 27. SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional**
- 28. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**
- 29. SOP Peminjaman Inventaris Kantor**
- 30. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif**
- 31. SOP Pengembalian BMN**
- 32. SOP Penghapusan BMN**
- 33. SOP Penyiapan Sidang Majelis Kehormatan Hakim, MA dan KY**
- 34. SOP Penyusunan Laporan BMN**
- 35. SOP Permintaan dan Distribusi Barang Persediaan**
- 36. SOP Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas**

B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.

Pada tahun 2023 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun dan penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, kenaikan pangkat Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawasan fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan PPNPN yang terdiri dari:

1. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 Orang
- Pejabat Eselon II : 4 Orang (Sekretaris dan 3 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 4 Orang
- Pejabat Eselon IV : 16 Orang

2. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 43 Orang
- Hakim Yustisial : 29 Orang
- Auditor : 39 Orang
- Auditor Kepegawaian : 6 Orang
- Pranata Komputer : 4 Orang
- Analis Kepegawaian : 3 Orang
- Pranata Keuangan APBN : 2 Orang

3. Pelaksana : 14 Orang

4. PPNPN : 13 Orang

Pada tahun 2023 jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 178 (seratus tujuh puluh

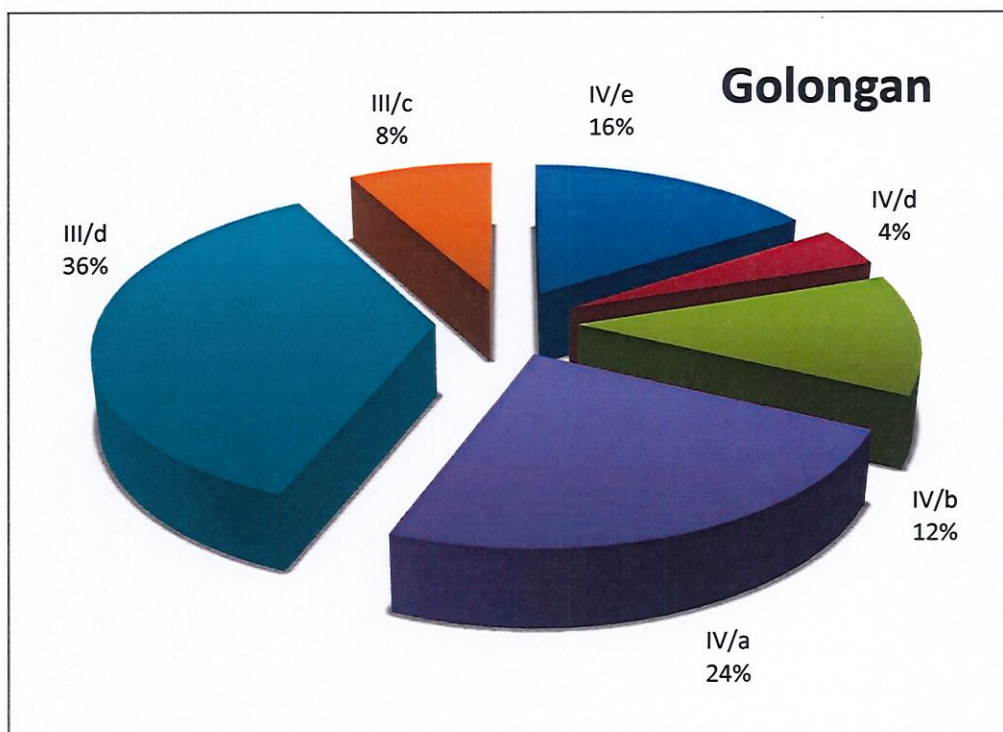
delapan) orang yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Pelaksana dan PPNPN kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas. Adapun untuk pengelompokan Pejabat Struktural ini berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1.1, tabel 1.1.2, tabel 1.1.3 dan tabel 1.1.4.

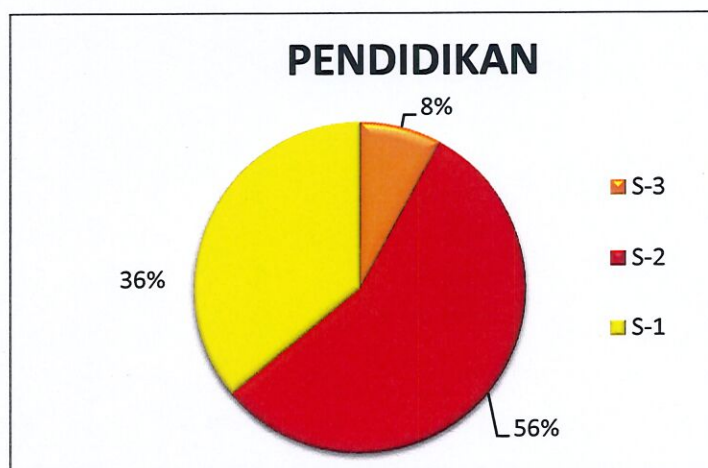
Tabel 1.1.1 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	4	16 %
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	4 %
3.	Pembina Tk I (IV/b)	3	12 %
4.	Pembina (IV/a)	6	24 %
5.	Penata Tk I (III/d)	9	36 %
6.	Penata (III/c)	2	8 %



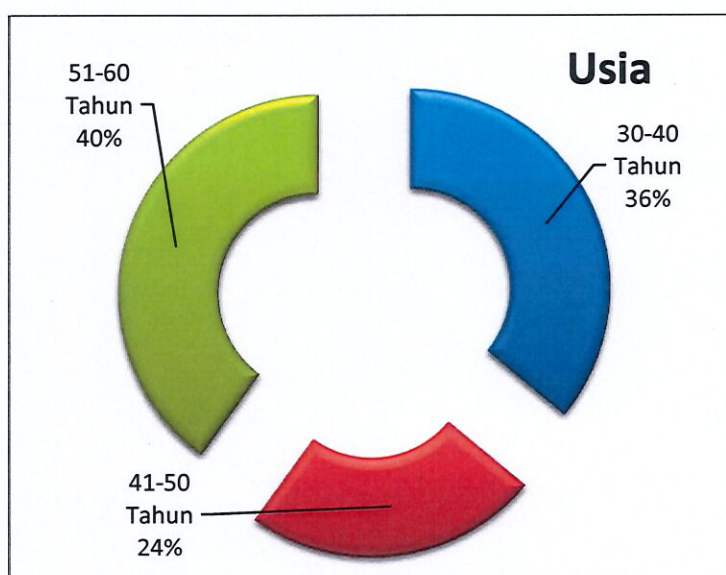
**Tabel 1.1.2 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	2	8 %
2.	S2	14	56 %
3.	S1	9	36 %



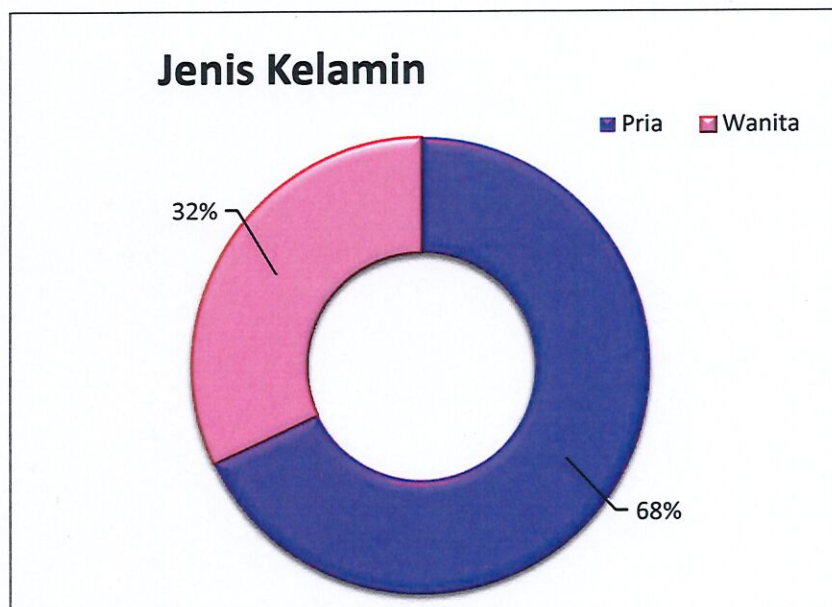
**Tabel 1.1.3 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia**

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	9	36 %
2.	41– 50	6	24 %
3.	51 – 60	10	40 %



**Tabel 1.1.4 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	17	68 %
2.	Wanita	8	32 %

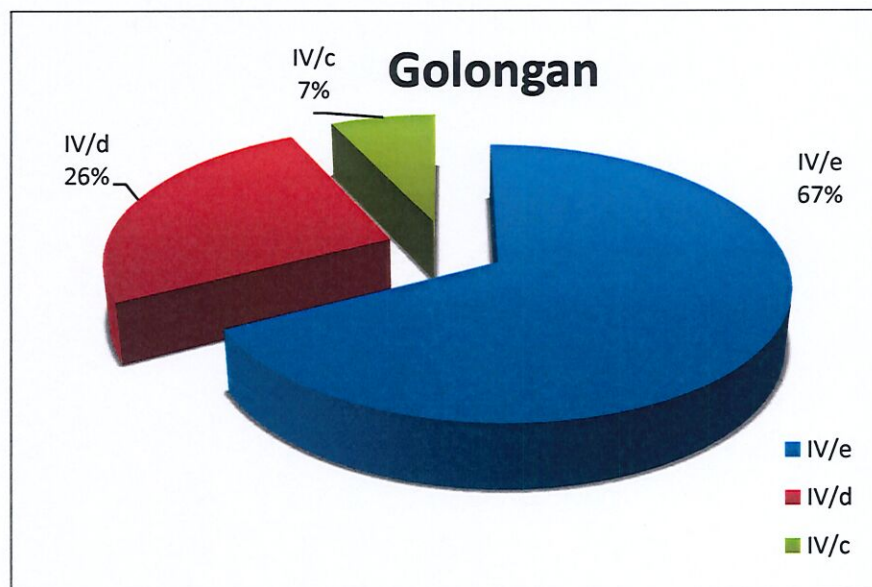


1.2. Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, dan Pejabat Fungsional

Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 128 (*seratus dua puluh delapan*) orang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Pranata Keuangan APBN. Adapun pangkat/golongan, pendidikan, usia dan jenis kelamin tenaga teknis tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

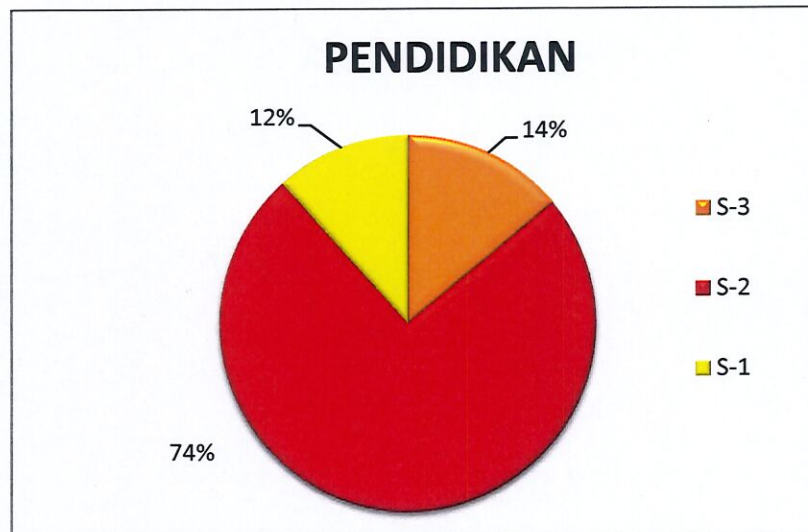
Tabel 1.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama (IV/e)	29	67%
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	11	26%
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	7%



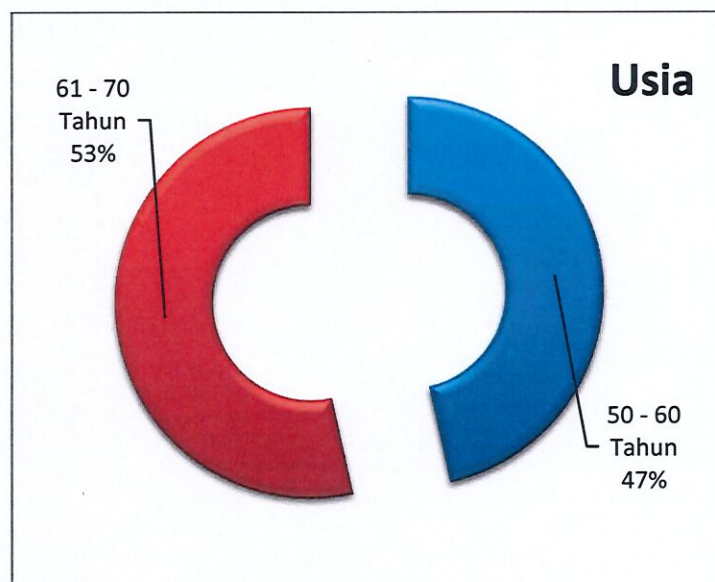
Tabel 1.2.2 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	6	14 %
2.	S2	32	74%
3.	S1	5	12%



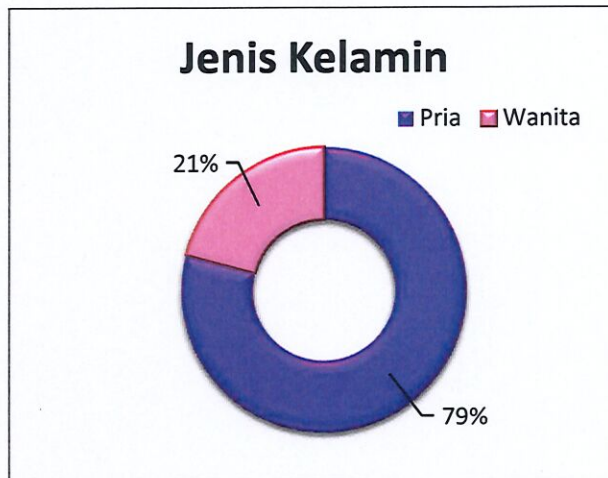
Tabel 1.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	50 – 60	20	47%
2.	61 – 70	23	53%



Tabel 1.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

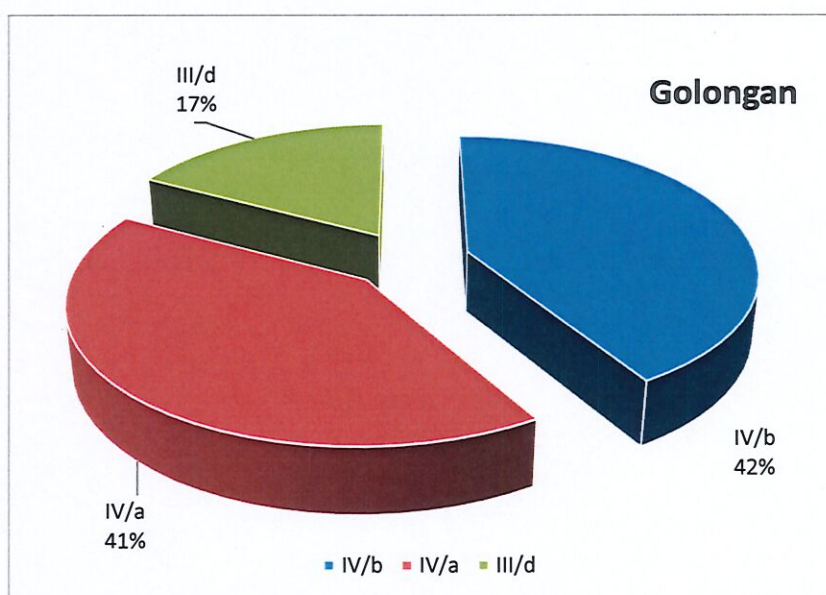
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	34	79%
2.	Wanita	9	21%



1.3. Hakim Yustisial

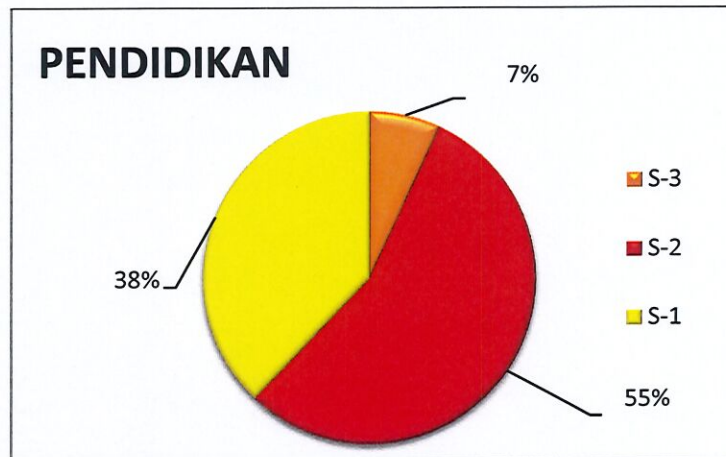
Tabel 1.3.1 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	12	42%
2.	Pembina (IV/a)	12	41%
3.	Penata Tk. I (III/d)	5	17%



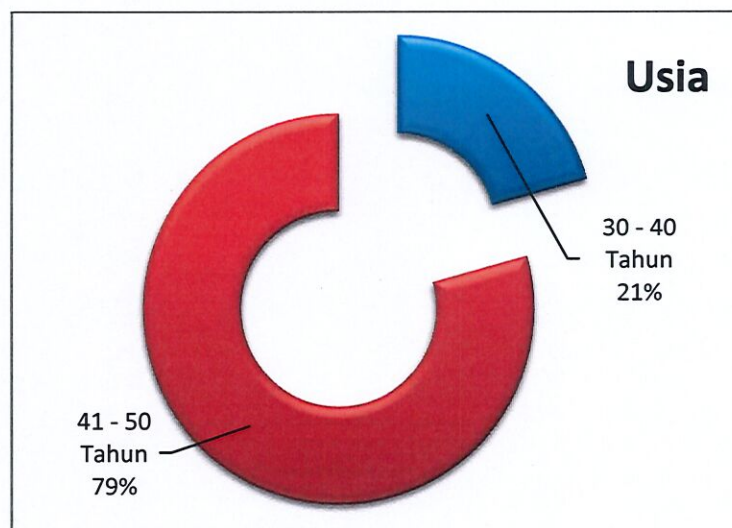
**Tabel 1.3.2 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S3	2	7%
2.	S2	16	55%
3.	S1	11	38%



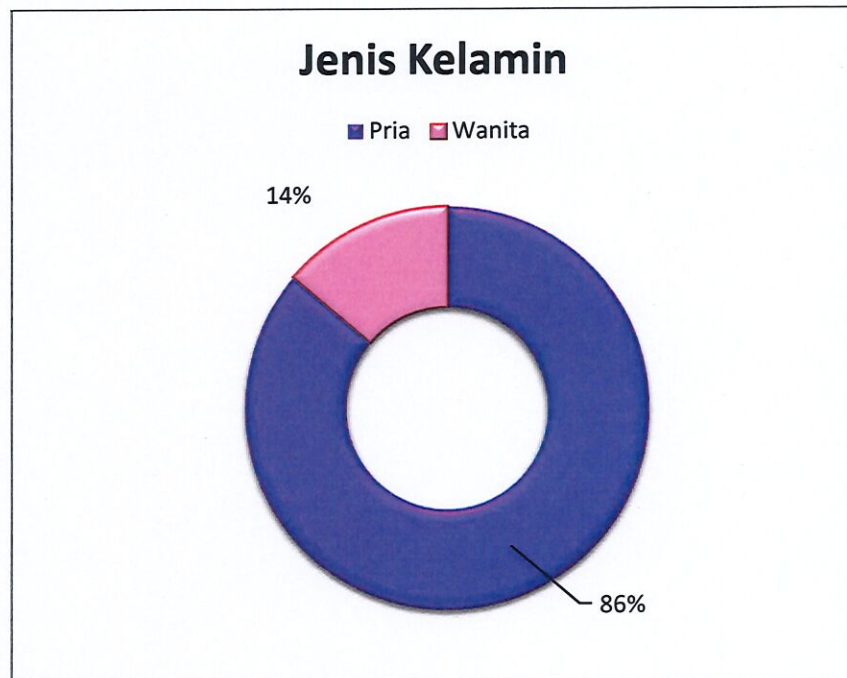
**Tabel 1.3.3 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia.**

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	6	21%
2.	41-50	23	79%



**Tabel 1.3.4 Data Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin**

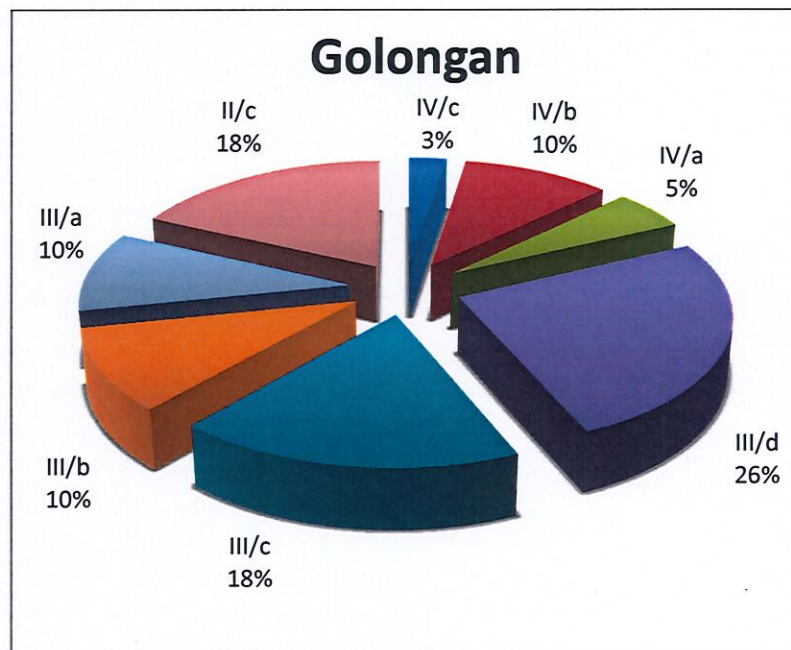
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	25	86%
2.	Wanita	4	14%



1.4. Auditor

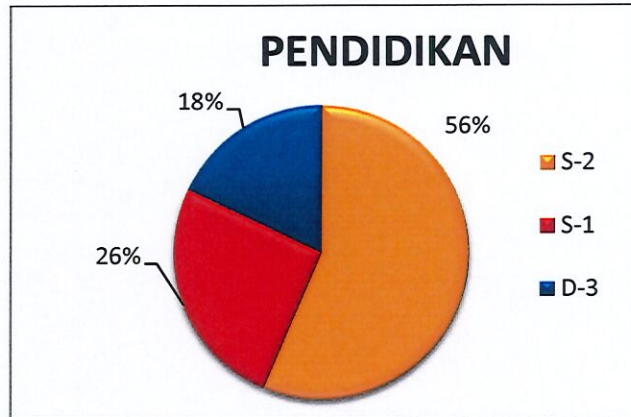
Tabel 1.4.1 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan.

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	3 %
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	4	10 %
3.	Pembina (IV/a)	2	5 %
4.	Penata Tk. I (III/d)	10	26 %
5.	Penata (III/c)	7	18 %
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	10 %
7.	Penata Muda (III/a)	4	10%
8.	Pengatur (II/c)	7	18%



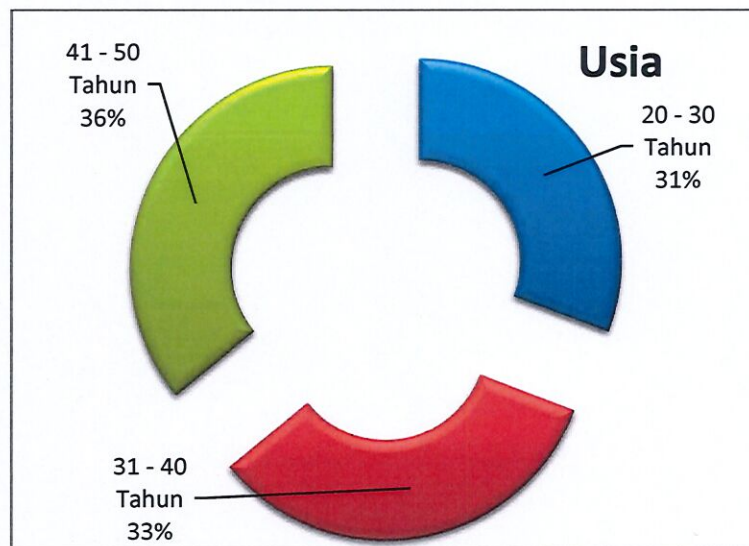
Tabel 1.4.2 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	22	56%
2.	S1	10	26%
3.	D3	7	18%



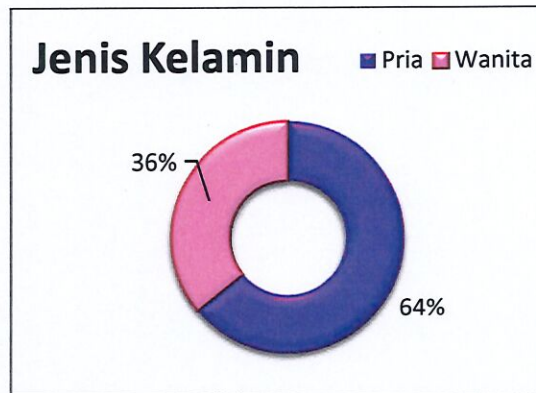
Tabel 1.4.3 Data Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20 -30	6	31%
2.	31-40	13	33%
3.	41-50	14	36%



Tabel 1.4.4 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

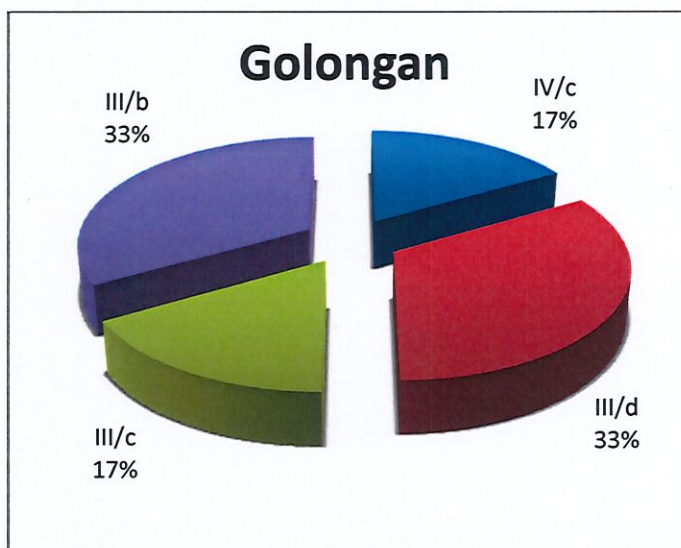
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	25	64%
2.	Wanita	14	36%



1.5. Auditor Kepegawaian

Tabel 1.5.1 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	17%
2.	Penata Tk. I (III/d)	2	33%
3.	Penata (III/c)	1	17%
4.	Penata Muda Tk.I (III/b)	2	33%



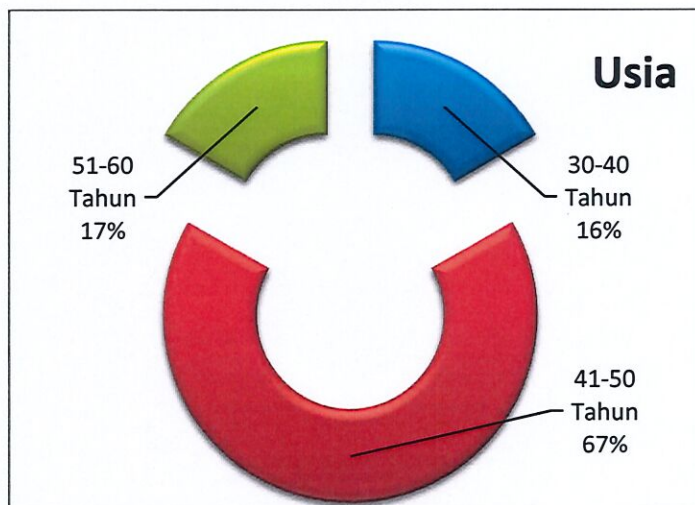
**Tabel 1.5.2 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	1	17 %
2.	S1	5	83 %



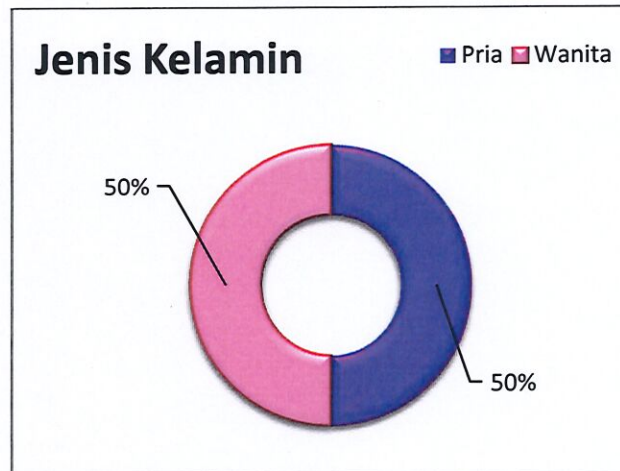
**Tabel 1.5.3 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia**

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	1	16%
2.	41 –50	4	67%
3.	51 – 60	1	17%



Tabel 1.5.4 Data Auditor Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

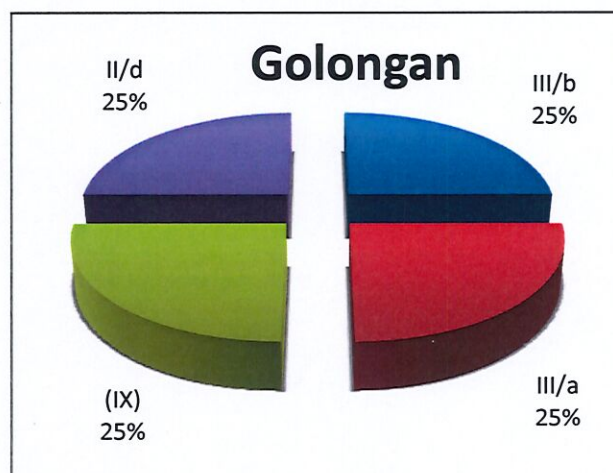
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	3	50%
2.	Wanita	3	50%



1.6. Pranata Komputer

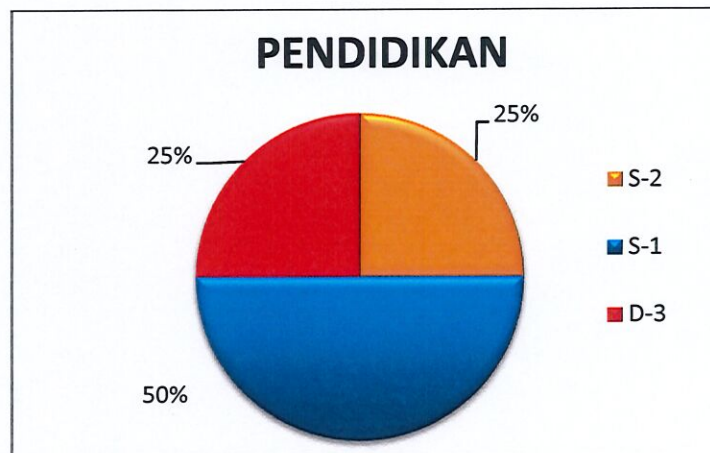
Tabel 1.6.1 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	25 %
2.	Penata Muda (III/a)	1	25 %
3.	Golongan (IX)	1	25 %
4.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	25 %



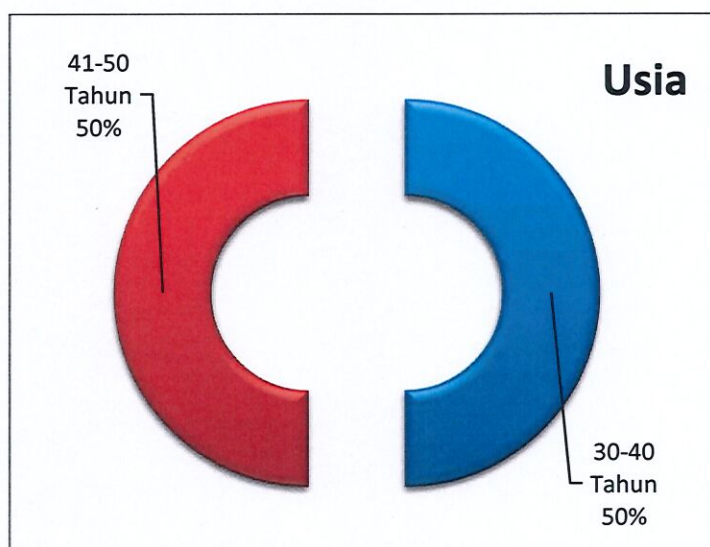
**Tabel 1.6.2 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	1	25 %
2.	S-1	2	50 %
3.	D-3	1	25 %



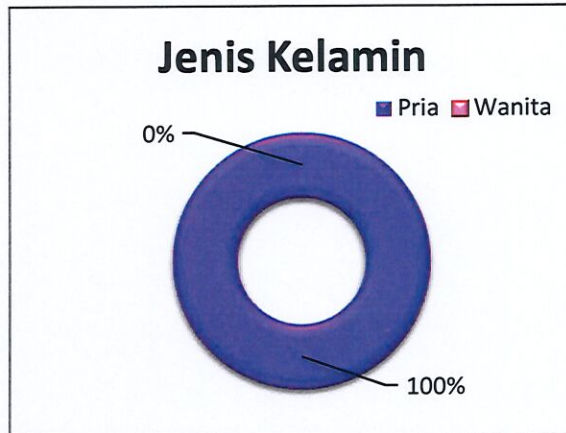
**Tabel 1.6.3 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia**

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	30 – 40	2	50 %
2.	41 – 50	2	50 %



Tabel 1.6.4 Data Pranata Komputer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

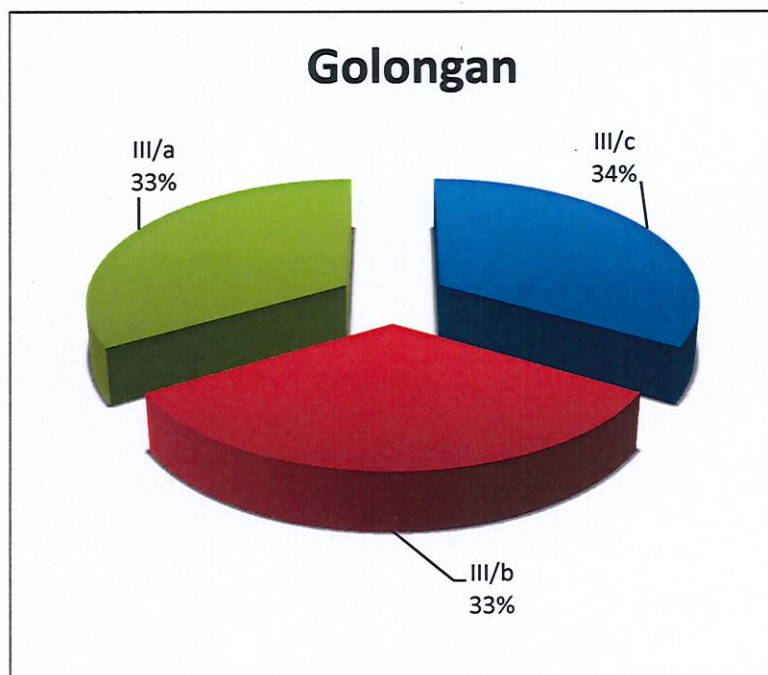
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	4	100%



1.7. Analisis Kepegawaian

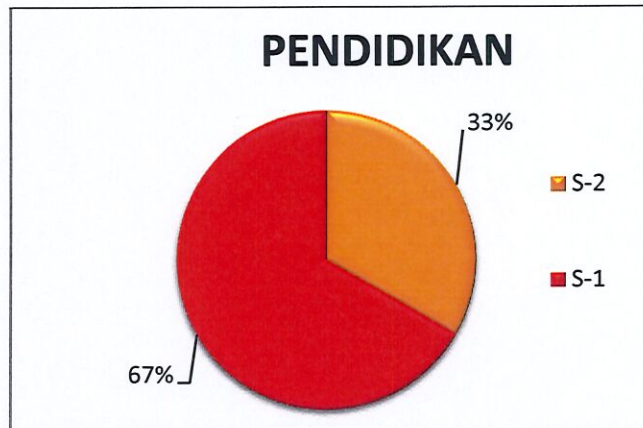
Tabel 1.7.1 Data Analisis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata (III/c)	1	34%
2.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	33%
3.	Penata Muda (III/a)	1	33%



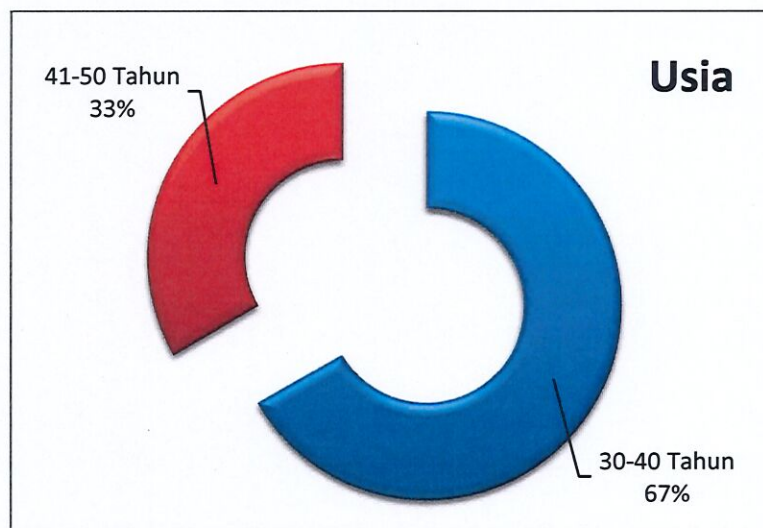
Tabel 1.7.2 Data Analisis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S-2	1	33 %
2.	S-1	2	67 %



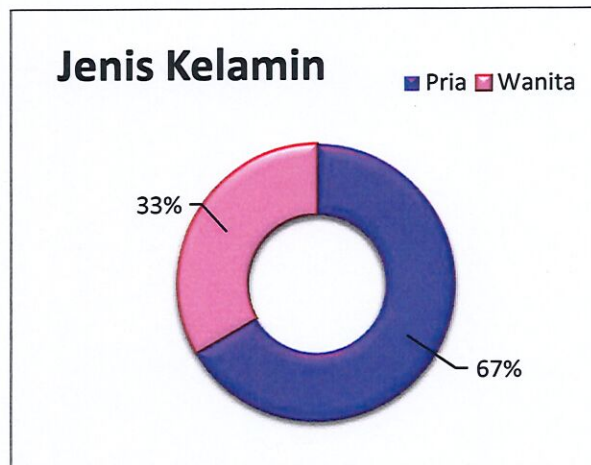
Tabel 1.7.3 Data Analisis Kepegawaian Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	30 – 40	2	67%
2	41 – 50	1	33%



Tabel 1.7.4 Data Analisis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

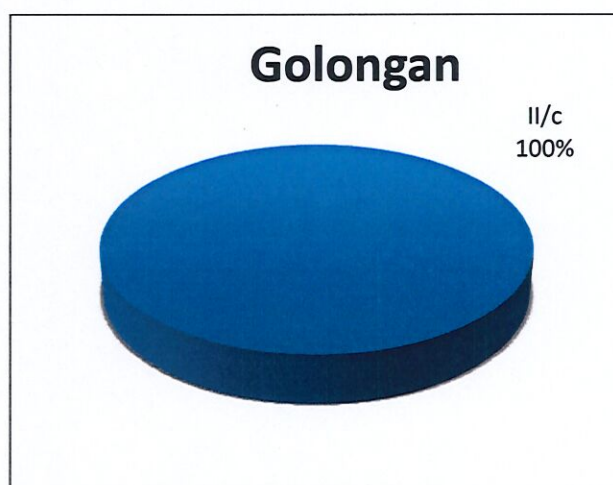
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	2	67%
2	Wanita	1	33%



1.8. Pranata Keuangan APBN

Tabel 1.8.1 Data Pranata Keuangan APBN pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pengatur (II/c)	2	100 %



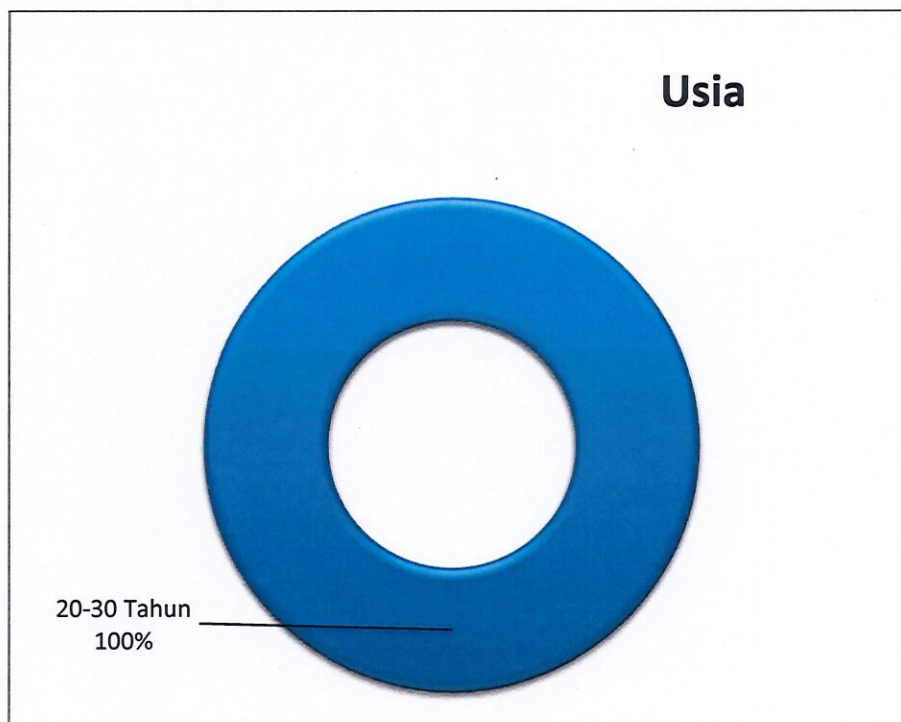
Tabel 1.8.2 Data Pranata Keuangan APBN pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	D-3	2	100 %



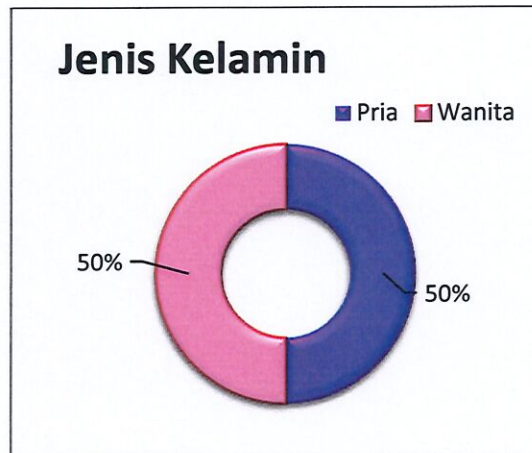
Tabel 1.8.3 Data Pranata Keuangan APBN Kepegawaian pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20 – 30	2	100 %



Tabel 1.8.4 Data Pranata Keuangan APBN pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

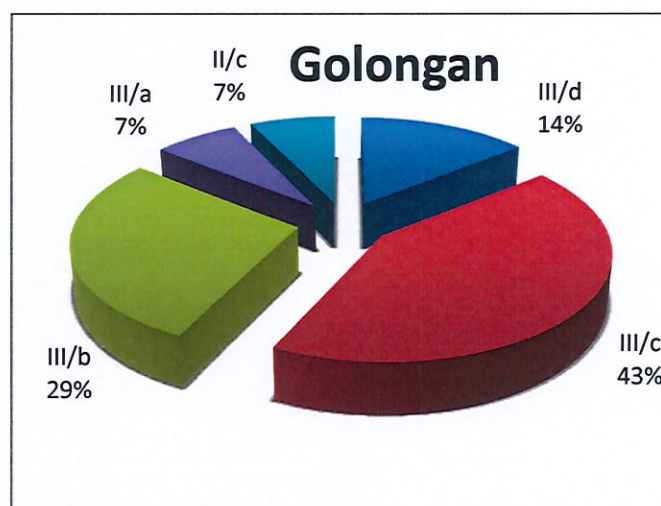
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	1	50%
2.	Wanita	1	50 %



1.9. Pelaksana

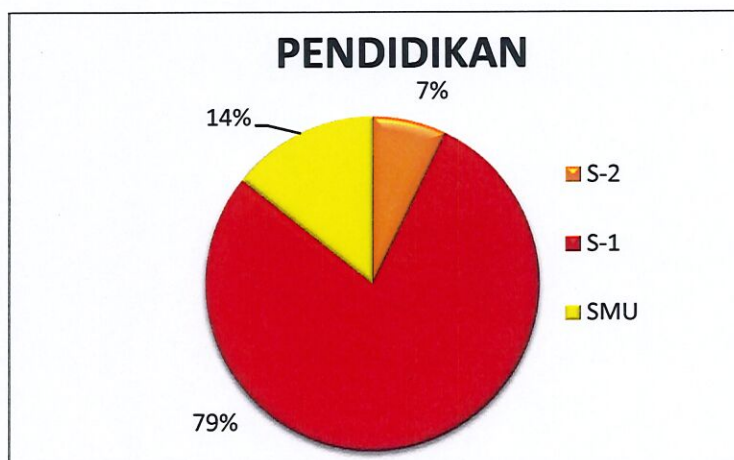
Tabel 1.9.1 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Penata Tk. I (III/d)	2	14%
2.	Penata (III/c)	6	43%
3.	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	29%
4.	Penata Muda (III/a)	1	7%
5.	Pengatur (II/c)	1	7%



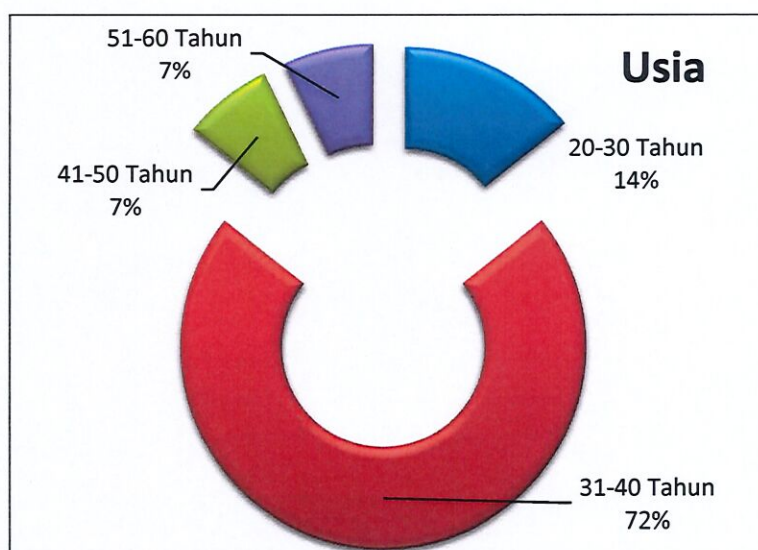
Tabel 1.9.2 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	S2	1	7%
2.	S1	11	79%
3.	SMU	2	14%



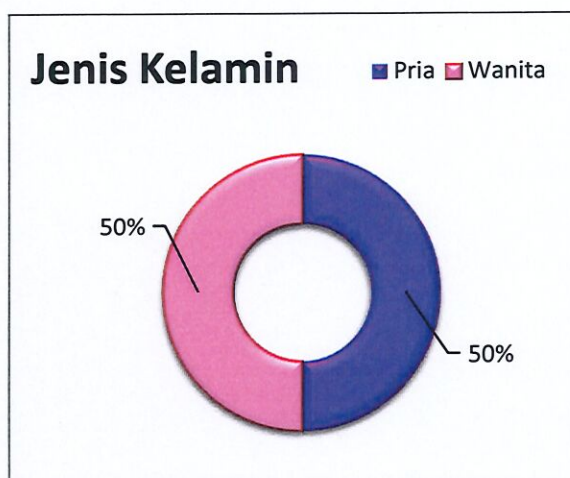
Tabel 1.9.3 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1.	20-30	2	50%
2.	31-40	10	34%
3.	41-50	1	8%
4.	51-60	1	8%



Tabel 1.9.4 Data Pelaksana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

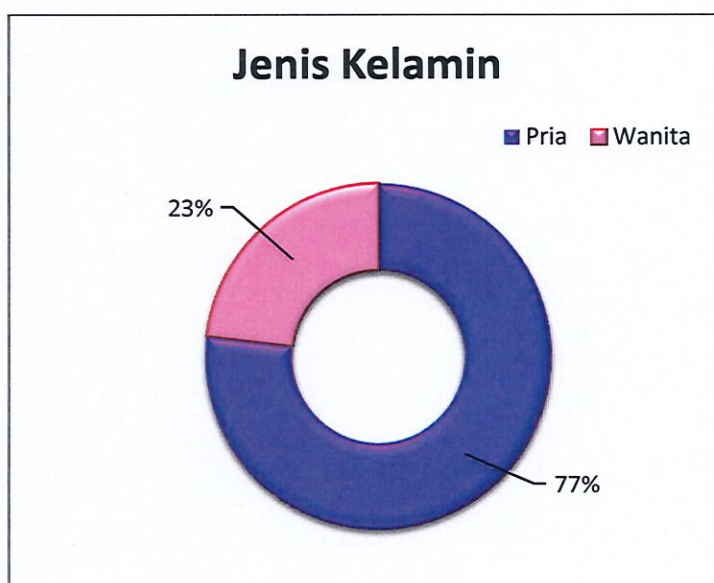
NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Pria	7	50 %
2.	Wanita	7	50 %



1.10. Honorer

Tabel 1.10.1 Data Honorer pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Pria	10	77%
2	Wanita	3	23%



2. Promosi Dan Mutasi Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Aviantara. S.H., M.Hum.	Pembina Utama/ Hakim Utama pada Badan Pengawasan MA RI	Pembina Utama /Hakim Utama/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado
2.	Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum.	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan MARI	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh
3.	Drs. Kholis, M.H.	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi PTA Samarinda	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi PTA Jakarta diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
4.	Dr. Orba Susilawati, M.H.I.	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi PTA Bangka Belitung	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi PTA Jakarta diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
5.	Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.	Pembina Utama Madya /Hakim	Pembina Utama Madya /Hakim

		Utama Muda/ Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung	Utama Muda/ Hakim Tinggi PTA Jakarta diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI
6	Noor Edi Yono, S.H., M.H.	Pembina Utama/ Hakim Utama pada Badan Pengawasan MA RI	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
7.	H. Slamet Riadi, SH., MH.	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi PT Kendari	Pembina Utama Madya /Hakim Utama Muda/ Hakim Tinggi PT Kendari diperbantukan pada Badan Pengawasan MARI

3. Promosi Dan Mutasi Jabatan Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.	Hakim Pratama Utama/Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur	Hakim Pratama Utama /Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
2.	Abdul Affandi, S.H.	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI
3.	Endang Lestari, S.H., M.Kn.	Hakim Madya Muda/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Muda/Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI

4.	Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E., M.H.	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI
5.	Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.	Hakim Madya Pratama/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
6.	Pronggo Joyonegara, S.H.	Hakim Madya Pratama/Hakim Pengadilan Negeri Pati	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
7.	Hendhy Eka Chandra, S.H.	Hakim Madya Pratama/Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
8.	Gugun Gunawan, S.H.	Hakim Madya Pratama/Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
9.	Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.	Hakim Madya Pratama/Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI
10.	Tri Mulyanto, S.H.	Hakim Madya Pratama/Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo	Hakim Madya Pratama/Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan MARI

4. Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Sutrisno, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Mutasi IB pada

		Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan	Badan Urusan Administrasi
2.	Mochtar Luthfi, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Pengawasan	Sekretaris Pengadilan Negeri Pati
3.	Dra. Yekti Handayani, S.H., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah III	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah IV
4.	Nuzliana Abda, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah IV	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah III
5.	I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra, S.E., M.H	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Badan Pengawasan
6.	Mariana Erka Puteri, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Badan Pengawasan
7.	Muhammad Adzkiya, S.E., M.Acc., C.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program & Peny. Anggaran pada Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan pada Sekretariat Badan Pengawasan

8.	Zelfikri Oktiva Lubis, S.T	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan pada Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program & Peny. Anggaran pada Sekretariat Badan Pengawasan
9.	Sri Widayanti, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Mutasi pada Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengawasan
10.	Faizal Amir, S.H.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Mutasi pada Sekretariat Badan Pengawasan
11.	Davis Rozano Besthari, S.Si.	Auditor Ahli Pertama Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Pengawasan
12.	Zullvan Sugiantoro, S.T.	Pranata komputer Ahli Muda Sekretariat Badan Pengawasan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Ipektorai Wilayah IV Badan Pengawasan

**5. Promosi dan Mutasi Pejabat Fungsional Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI**

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Arief Purwoko, S.Kom.	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Muda
2.	Nur Susana Tifa, S.E.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	Auditor Ahli Pertama
3.	Abu Samah, S.E., M.M. Ak. CA.	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Madya

4.	Tahfidz Wilda Asysyfa, A.Md.Ak	Pengelola Surat	Auditor Pelaksana
5.	Farid Iqbal Darmawan, A.Md.Ak	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	Auditor Pelaksana
6.	Ricky Pramoedya Hermawan, A.Md.Ak	Pengelola Tata Naskah	Auditor Pelaksana
7.	Sri Ayu Prastika Safitri Siregar, A.Md.Ak	Pengelola Surat	Auditor Pelaksana
8.	Ines Malahayati Maharani, A.Md.Ak.	Pengelola Surat	Auditor Pelaksana
9.	Anne Marie, A.Md.Ak	Pengelola Surat	Auditor Pelaksana
10.	Laili Devinka, A.Md.Ak	Pengelola Kepegawaian	Auditor Pelaksana
11.	Sari Alsaqati Ardana, A.Md.Kb.N	Pengelola Akuntansi	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana
12.	Erlanda Mawangsa, A.Md.Ak.	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana
13.	Bram Budi Nurchahyo, S.E., Ak., M.H.	Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Pengawasan	Arsiparis Ahli Pertama pada Pengadilan Agama Depok
14.	Victor Parlindungan Sitorus, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Negeri Nunukan	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Pengawasan
15.	Budi Iswara, S.Kom., M.Kom.	PPPN PT Pekanbaru	Pranata Komputer Ahli Pertama pada

			Sekretariat Badan Pengawasan
16.	Ekasari Kurniawati, S.E., MA.	Auditor Ahli Pertama	Auditor Ahli Muda

6. Promosi Dan Mutasi Pelaksana Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA	ASAL DARI	MUTASI KE
1.	Yurimis Waldi, S.M.	Jurusita pada Pengadilan Agama Batam	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Badan Pengawasan
2.	Sutikno, S.Kom	Analisis Tata Usaha pada Sekretariat Badan Pengawasan	Analisis Humas pada Pengadilan Agama Klaten

7. Mutasi Kepangkatan Hakim Tinggi Pengawasan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO	NAMA	PANGKAT /GOL.	T.M.T	PANGKAT /GOL.	T.M.T
1.	H. Nahison Dasa Brata, SH., MHum.	IV/d	1-04- 2019	IV/e	1-04-2023
2.	Dr. Dra. Hj. Lilik Muliana, M.H.	IV/d	1-10- 2019	IV/e	1-10-2023

**8. Mutasi Kepangkatan Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI**

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangkat/ Gol	T.M.T
1.	Anisah Shofiawati, S.H.	IV/a	1-4-2019	IV/b	1-4-2023
2.	Endang Lestari, S.H., M.Kn.	IV/a	1-4-2019	IV/b	1-4-2023
3.	Ramon Wahyudi, S.H., M.H.	IV/a	1-4-2019	IV/b	1-4-2023
4.	Afit Rufiadi, S.H., M.H.	IV/a	1-4-2019	IV/b	1-4-2023
6.	Hengky Kurniawan, S.H., M.H.	IV/a	1-4-2019	IV/b	1-4-2023
7.	Awal Darmawan Akhmad, S.H.	IV/a	1-4-2019	IV/b	1-4-2023
8.	Averroes, S.H.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023
9.	Fathur Rizqi, S.H.I., M.H.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023
10.	Letkol Hadi Prayotno, S.H., M.M.	Mayor	1-10- 2013	Letkol	1-10- 2023
11.	Dr. H. Ahmad Syahrus Sikti, S.H.I., M.H.	III/d	1-10- 2019	IV/a	1-10- 2023

**9. Mutasi Kepangkatan Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu
Dan Pelaksana Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**

No	Nama	Pangkat/ Gol	T.M.T	Pangkat/ Gol	T.M.T
1.	Sutrisno, S.H.I.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023

2.	Arie Nur Rochmat, S.H.	III/d	1-4-2019	IV/a	1-4-2023
3.	I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra, S.E., M.H.	III/d	1-4-2017	IV/a	1-4-2023
4.	Mariana Erka Puteri, S.H., M.H.	III/d	1-4-2019	IV/a	1-4-2023
5.	Amarillo Rizkia, S.Psi.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023
6.	Yusuf, S.E., Ak., CA. M.Ak.	IV/a	1-4-2021	IV/b	1-4-2023
7.	Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H.	IV/a	1-4-2018	IV/b	1-4-2023
8.	Virna Prasamia Nugraha, S.E., S.Pd.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023
9.	Arief Purwoko, S.Kom.	III/b	1-4-2019	III/c	1-4-2023
10.	Riswan Marhaen Renuat, S.Kom., M.H.	III/a	1-10- 2018	III/b	1-4-2023
11.	Nur Afianti Fajriyan, S.Pn., M.A.	III/a	1-12- 2020	III/b	1-4-2023

12.	Rachma Kurniati, S.Psi.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023
13.	Emriko Pratino, S.H.	III/c	1-4-2019	III/d	1-4-2023
14.	Novan Puji Mahaputra, S.Kom., S.H.	III/b	1-4-2019	III/c	1-4-2023
15.	Sukriadi Tanjung, S.Kom.	III/b	1-4-2019	III/c	1-4-2023
16.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi., M.H.	III/b	1-4-2019	III/c	1-4-2023
17.	Dewi Putri Noviandari, S.Kom.	III/b	1-4-2019	III/c	1-4-2023
18.	Mawardi, S.H.	III/a	1-4-2019	III/b	1-4-2023
19.	Renatha Arini, S.E.	III/a	1-3-2019	III/b	1-4-2023
20.	Arga Kurniawan, S.H.	III/a	1-3-2019	III/b	1-4-2023
21.	Nur Prista Alshabira, S.Psi.	III/a	1-3-2019	III/b	1-4-2023
22.	Ferri Taufik Ferdiansyah, SE. Ak. CA. M.Ak. C.Fra	IV/a	1-10- 2021	IV/c	1-10- 2023
23.	Abu Samah, S.E., M.M., Ak. CA.	III/d	1-4-2018	IV/a	1-10- 2023
24.	Faizal Amir, S.H.	III/c	1-4-2019	III/d	1-10- 2023

25.	Yugus Dwi Prasetyo, S.E., M.M.	III/c	1-4-2017	III/d	1-10-2023
26.	Davis Rozano Besthari, S.Si	III/b	1-4-2019	III/c	1-10-2023
27.	Yan Darmawan, S.H., M.H.	III/a	1-12-2020	III/b	1-10-2023
28.	Yurimis Waldi, S.M.	II/d	1-4-2022	III/b	1-10-2023

10. Hakim Tinggi Pengawas Yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Roedy Suharso, S.H., M.H.	32 Tahun	01-03-2023
2.	Nova Flory Bunda, SH., MHum.	30 Tahun	01-03-2023
3.	Drs. Ahmad Nur, M.H.	26 Tahun	01-03-2023

11. Hakim Yustisial Yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Dr. Ahmad Syahrus Sikti, SHI, MH,	12 Tahun	01-01-2023
2.	Fathur Rizki, SHI., MH.	12 Tahun	01-01-2023
3.	Arif Budiman Lc., MA.Hk.	12 Tahun	01-01-2023
4.	Averroes, SH.	12 Tahun	01-01-2023
5.	Akhmad Budiawan, SH., MH.	22 Tahun	01-12-2023
6.	Muhammad Nur Ibrahim, SH., MH.	22 Tahun	01-12-2023
7.	Dian Anggraini, SH., MH.	22 Tahun	01-12-2023
8.	Anik Istirochah, SH., MHum.	22 Tahun	01-12-2023

9.	Morindra Kresna, S.H.	20 Tahun	01-12-2023
10.	Abdul Affandi, S.H.	20 Tahun	01-12-2023
11.	Koko Riyanto, SH., MH.	20 Tahun	01-12-2023
12.	Wahyu Sudrajat, SH., MHLi	20 Tahun	01-12-2023
13.	Dr. Supandriyo, SH., MH.	20 Tahun	01-12-2023
14.	Tri Joko Sutikno, S.H., S.Sos., M.H.	14 Tahun	01-12-2023

**12. Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum
Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Yang
Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala**

NO	NAMA	MASA KERJA	T.M.T
1.	Arie Nur Rochmat, S.H.	14 Tahun	01-01-2023
2.	Muhammad Huzaifah, SKom.	12 Tahun	01-01-2023
3.	Nur Susana Tifa, SE.	12 Tahun	01-01-2023
4.	Virna Prasamia Nugraha, SE., S.Pd.	12 Tahun	01-01-2023
5.	Amarilldo Rizkia, S.Psi.	12 Tahun	01-01-2023
6.	Emriko Pratino, S.H	12 Tahun	01-01-2023
7.	Zullvan Sugiantoro, ST.	12 Tahun	01-01-2023
8.	Rachma Kurniati, S.Psi.	12 Tahun	01-01-2023
9.	Devi Pradifta Army, SH.	12 Tahun	01-01-2023
10.	IGLN Sidemen Putra, S.E., M.H.	18 Tahun	01-02-2023
11.	Drs. Andi Kurniawan, MM.	30 Tahun	01-03-2023

12.	Dra. Any Dyah Wijayanti	32 Tahun	01-03-2023
13.	Narti Sri Sugiarti, S.E.	12 Tahun	01-03-2023
14.	Novan Puji Mahaputra, S.Kom, S.H.	8 Tahun	01-03-2023
15.	Arief Purwoko, S.Kom	8 Tahun	01-03-2023
16.	Sukriadi Tanjung, SKom.	8 Tahun	01-03-2023
17.	Dewi Putri Noviandari, S.Kom.	8 Tahun	01-03-2023
18.	Nawangsih Ayu Hartami, SPsi., M.H.	8 Tahun	01-03-2023
19.	Rezky Azhari, S.Psi., MM.	8 Tahun	01-03-2023
20.	Dwi Febri Yandi, S.E., M.S.Ak.	8 Tahun	01-03-2023
21.	Syarifullah M Nur, S.Kom., M.Ak.	8 Tahun	01-03-2023
22.	Suriyanto, S.H., M.H.	8 Tahun	01-03-2023
23.	Rizky Setyo Pambudi, S.Kom.	8 Tahun	01-03-2023
24.	Yuan Chintya Br Simanjuntak, S.P.	8 Tahun	01-03-2023
25.	Davis Rozano Besthari, S.Si	8 Tahun	01-03-2023
26.	Ridwan AR, S.Kom	6 Tahun	01-03-2023
27.	Riswan Marhaen Renuat, S.Kom., M.H.	6 Tahun	01-03-2023
28.	Agustaja Tiyusandy, A.Md.Kom.	11 Tahun	01-03-2023

29.	Arga Kurniawan, S.H.	4 Tahun	01-03-2023
30.	Nur Prista Alshabira, S.Psi	4 Tahun	01-03-2023
31.	Renatha Arini, S.E.	4 Tahun	01-03-2023
32.	Hendra Basry, SE., M.Ak.	14 Tahun	01-04-2023
33.	Yugus Dwi Prasetyo, SE., MM.	14 Tahun	01-04-2023
34.	Yanalia Nurmawati, SE., SH., Mak.	14 Tahun	01-04-2023
35.	Musa La Haji, S.H.I.	16 Tahun	01-04-2023
36.	Recky Roger Koraag, SH.	12 Tahun	01-04-2023
37.	Rizki Rantaperkasa, SH.	12 Tahun	01-04-2023
38.	Lety Puspitosari, SE., MM.	14 Tahun	01-04-2023
39.	Hendra Rahmadani, SKom, MM.	14 Tahun	01-04-2023
40.	Faizal Amir, SH.	14 Tahun	01-04-2023
41.	Jhon Richo, S.Psi., MM.	14 Tahun	01-04-2023
42.	Apriyadi Romian Kardono, SE., Akt. M.Ak.	14 Tahun	01-04-2023
43.	Muhammad Adzkiya, S.E., M.Acc.	14 Tahun	01-04-2023
44.	Zelfikri Oktiva Lubis, S.T.	14 Tahun	01-04-2023
45.	Dra. Yekti Handayani, SH., MSi	30 Tahun	01-10-2023
46.	Wiwi Ismiyati, SH., MH.	28 Tahun	01-10-2023

47.	Mariana Erka Puteri, SH., MH.	14 Tahun	01-10-2023
48.	Iva Fairouz Afrinadya, SH., MH.	22 Tahun	01-12-2023
49.	Dewi Nurqolbi Tri Astuti, S.Psi., MH.	14 Tahun	01-12-2023
50.	Mochamad Ulul Ilmi, S.E.	14 Tahun	01-12-2023
51.	Jufri Hardi, ST., MH.	14 Tahun	01-12-2023
52.	Sahreza Harahap, SE., SH., M.Ak	12 Tahun	01-12-2023

13. Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat Struktural Dan Fungsional Tertentu Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Yang Memasuki Purnabakti/ Pensiun

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1.	R. Lucky Permana, SH., MH.	Pustakawan Madya	01-03-2023
2.	Sri Anggarwati, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-05-2023
3.	Dra. Azizah Bajuber, SH., MH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-09-2023
4.	Sri Misgianti, SE., MH.	Pustakawan Madya	01-10-2023
5.	Kusnoto, SH.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MARI	01-11-2023

14. Penghargaan Satya Lancana 30 Tahun, 20 Tahun Dan 10 Tahun Yang Diperoleh Oleh Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Dan Pelaksana Pada Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

NO	NAMA	JABATAN	SATYA LANCANA
1.	Sugiyanto, SH	Kepala Badan Pengawasan	30 Tahun
2.	Suradi, SH., MH	Inspektur Wilayah II	30 Tahun
3.	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	Inspektur Wilayah IV	30 Tahun
4.	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M.	Sekretaris Badan	30 Tahun
5.	Drs. H. Mohamad Yamin, SH., MH.	Hakim Tinggi	30 Tahun
6.	Annas Mustaqim, SH., MHum	Hakim Tinggi	30 Tahun
7.	Nova Flory Bunda, SH. MHum	Hakim Tinggi	30 Tahun
8.	H. Nahison Dasa Brata, SH., MH.	Hakim Tinggi	30 Tahun
9.	Dr. Dra. Lilik Muliana, MH.	Hakim Tinggi	30 Tahun
10.	Susilowati, SH., MH.	Hakim Tinggi	30 Tahun
11.	Udjianti, SH., MH.	Hakim Tinggi	30 Tahun
12.	Isnurul Syamsul Arif, SH., MH.	Hakim Tinggi	30 Tahun
13.	Sodikin SE., SH. MM.	Kabag Perencanaan dan Keuangan	20 Tahun
14.	Anik Istirochah, SH., MHum	Hakim Yustisial	20 Tahun

15.	Ade Suherman, SH., MH.	Hakim Yustisial	20 Tahun
16.	Ramon Wahyudi, SH., MH.	Hakim Yustisial	20 Tahun
17.	Anisah Shofiawati, SH.	Hakim Yustisial	20 Tahun
18.	Awal Darmawan Akhmad, SH	Hakim Yustisial	20 Tahun
19.	Hengky Kurniawan, SH., MH.	Hakim Yustisial	20 Tahun
20.	Endang Lestari, SH., MKn	Hakim Yustisial	20 Tahun
21.	Afit Rufiadi, SH., MH.	Hakim Yustisial	20 Tahun
22.	Dr. Firdaus Syafaat, SH., SE. MH.	Hakim Yustisial	16 Tahun
23.	Eko Purwanto, ST., MH.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	16 Tahun
24.	Mariana Erka Puteri, SH. MH.	Kasubbag Rumah Tangga	16 Tahun
25.	Dra. Siti Zainab, MM.	Auditor Kepegawaian Madya	30 Tahun
26.	Ferri Taufik Ferdiansyah, SE. MAk	Auditor Madya	16 Tahun
27.	Yusuf, SE., Mak.	Auditor Madya	16 Tahun
28.	Imam Purnomo, SE	Auditor Madya	16 Tahun
29.	Muhammad Anis, SE., M.Ak.	Auditor Madya	16 Tahun
30.	Mulia Karyadi ST, MM.	Auditor Muda	16 Tahun

31.	Betty Kurnianingtyas, S.Kom.	Auditor Kepegawaian Muda	16 Tahun
32.	Abu Samah SE., MM.	Auditor Muda	16 Tahun
33.	Nurdiansyah, SH., MM.	Auditor Muda	16 Tahun
34.	Musa La Haji, SHI.	Auditor Kepegawaian Muda	16 Tahun
35.	Sahreza Harahap, SE., SH., M.Ak.	Auditor Muda	8 Tahun
36.	Rezky Azhari, S.Psi. MM.	Auditor Muda	8 Tahun
37.	Arief Purwoko, S.Kom.	Auditor Muda	8 Tahun
38.	Dwi Febri Yandi, SE. MSAk.	Auditor Muda	8 Tahun
39.	Syarifullah M Nur, SKom., M.Ak.	Auditor Muda	8 Tahun
40.	Suriyanto, SH., MH.	Auditor Muda	8 Tahun
41.	Rizky Setyo Pambudi SKom	Auditor Pertama	8 Tahun
42.	Yuan Chintya Br. Simanjuntak, S.P	Analisis Tata Usaha	8 Tahun
43.	Dewi Putri Noviandari, SKom.	Penyusun Bahan Dokumentasi dan Informasi	8 Tahun
44.	Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi., M.H.	Analisis Tata Usaha	8 Tahun
45.	Novan Puji Mahaputra, S.Kom, SH.	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	8 Tahun

46.	Sukriadi Tanjung, S.Kom.	Analisis Perencanaan Anggaran	8 Tahun
47.	Ridwan AR, S.Komp	Analisis Kepegawaian Pertama	8 Tahun
48.	Riswan Marhaen Renuat, SKom.,MH.	Auditor Pertama	8 Tahun
49.	Agustaja Tiyusandi, AMd.Kom.	Pranata Komputer Pelaksana	8 Tahun
50.	Ekasari Kurniawati, SE., MA	Auditor Pertama	16 Tahun
51.	Rizki Rantaperkasa, SH.	Auditor Kepegawaian Pertama	16 Tahun
52.	Recky Roger Koraag, SH.	Auditor Kepegawaian Pertama	16 Tahun
53.	Davis Rozano Besthari, S.Si	Auditor Pertama	8 Tahun

15. SDM Pejabat/Hakim Tinggi Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pustakawan, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Arsiparis, Pejabat Struktural Serta Fungsional Umum Yang Mengikuti Diklat, Bimtek Dan Sosialisasi

No	Nama Diklat, Bimtek, Sosialisasi	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Tujuan
1.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	23	Pusdiklat was BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
2.	Pengajar dalam Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengadaan Barang dan	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM

	Jasa Bagi Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia dengan Materi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH)			
3.	Pengajar dalam Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
4.	Narasumber dalam Pelatihan/Workshop Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kerjasama KAS- JSLG-KY	2	JSLG	Peningkatan Kompetensi SDM
5.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
6.	Narasumber pada Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	1	Pusdiklat was BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
7.	Workshop terkait dengan Integritas Peradilan di Indonesia	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
8.	Pengajar dalam Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris bagi Hakim Tingkat	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM

	Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia			
9.	Sosialisasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	2	Sekretariat Mahkamah Agung	Peningkatan Kompetensi SDM
10.	Pelatihan Fungsional Auditor Terampil di Lingkungan APIP secara E-learning dengan Sumber Dana PNB	7	Pusdiklat was BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
11.	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	7	Pusdiklat Kementerian Perhubungan	Peningkatan Kompetensi SDM
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika	2	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
13.	pengajar pada Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
14.	pengajar pada Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika	2	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
15.	pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya	2	Pusdiklat was BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
16.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM

17.	Pengajar pada Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
18.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
19.	pengajar pada Pelatihan Sertifikasi Mediator	3	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
20.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
21.	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	2	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
22.	pengajar pada Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	4	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
23.	Pengembangan SDM Badan Pengawasan	182	Badan Pengawasan	Peningkatan Kompetensi SDM
24.	Pelatihan Singkat Sengketa Dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah	2	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
25.	Pengajar dalam Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Gel. III Tahun 2023	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
26.	Pelatihan Aplikasi Integrated Disiplin (IDIS) V.2.0	1	Pusdiklat BKN	Peningkatan Kompetensi SDM

27.	narasumber dalam kegiatan Diskusi Hukum Tentang Perempuan dan Anak dalam Perkara Jinayat	1	MS Lhokseu mawe	Peningkatan Kompetensi SDM
28.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum	2	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
29.	Narasumber pada kegiatan Pelatihan Hakim Pengawas Bidang	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
30.	Pelatihan Integritas Dan Penguatan Anti Korupsi	5	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
31.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
32.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
33.	Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1	Pusdiklat was BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
34.	Pengajar pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi	1	Balitbang diklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
35.	Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023	1	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
36.	Pelatihan UNODC tentang "Strategic Collection and Use of Objective Means of	1	UNODC	Peningkatan Kompetensi SDM

	Evidence including Electronic Evidence”			
37.	Workshop yang mengambil tema besar “Meninjau Kembali Implementasi UNCAC di Indonesia”	2	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
38.	Focus Group Discussion (FGD) Konsep Talent Pool Calon Hakim Agung Potensial	1	Komisi Yudisial	Peningkatan Kompetensi SDM

1. Hasil Evaluasi Jabatan Struktural

Secara global dampak revolusi industri 4.0 pada gilirannya menimbulkan risiko otomatisasi jabatan dan pergeseran kompetensi yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan, termasuk didalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Pergeseran ini akan berpengaruh terhadap jabatan bagi ASN, sehingga evaluasi jabatan memiliki peran penting.

Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut.

Pedoman Evaluasi Jabatan ini menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau *Factor Evaluation System* (FES) yang dituangkan dalam suatu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Amanat tersebut belum dapat dicapai dengan baik karena belum ada regulasi berupa pedoman evaluasi jabatan yang dapat digunakan untuk membobot suatu jabatan.

Evaluasi jabatan di lingkungan Badan Pengawasan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam program kepegawaian,

seperti: penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Selain kelas jabatan, evaluasi jabatan akan menghasilkan peta jabatan serta analisis harga jabatan. Hasil evaluasi jabatan ini juga dapat dimanfaatkan secara luas, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, hingga pemberhentian. “Jabatan yang dibuka dalam rekrutmen ASN akan betul-betul spesifik dan jabatan-jabatan yang mempunyai keahlian sesuai dengan hasil evaluasi jabatan.

Adapun tabel evaluasi jabatan yang telah ditetapkan di lingkungan badan pengawasan sebagai berikut:

Tabel 1. Evaluasi Jabatan

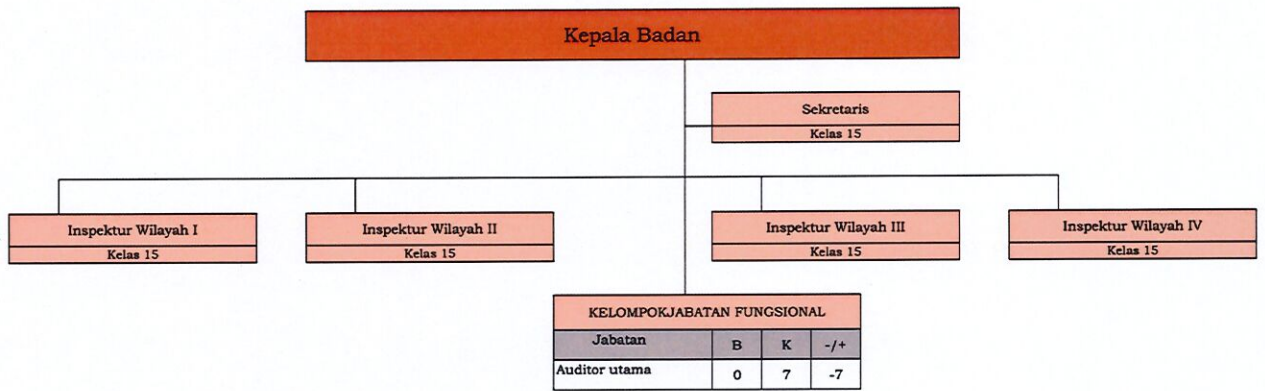
No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	
										Sifat Hub.	Tujuan Hub.						
1	Kepala Badan Pengawasan	16	4045	4	775	3	350	2	775	4	100	4	125	6	800	4	1120
2	Sekretaris Badan Pengawasan	15	3600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	3	975
3	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	13	2615	3	550	2	250	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
5	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
6	Kepala Sub Bagian Akuntansi	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
7	Kepala Bagian Kepegawaian	13	2615	3	550	2	250	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	
										Sifat Hub.	Tujuan Hub.						
8	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
9	Kepala Sub Bagian Mutasi	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
10	Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
11	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	2615	3	550	2	250	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
12	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
13	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
14	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
15	Kepala Bagian Umum	13	2615	3	550	2	250	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
17	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
18	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
19	Inspektur Wilayah I	15	3600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	3	975

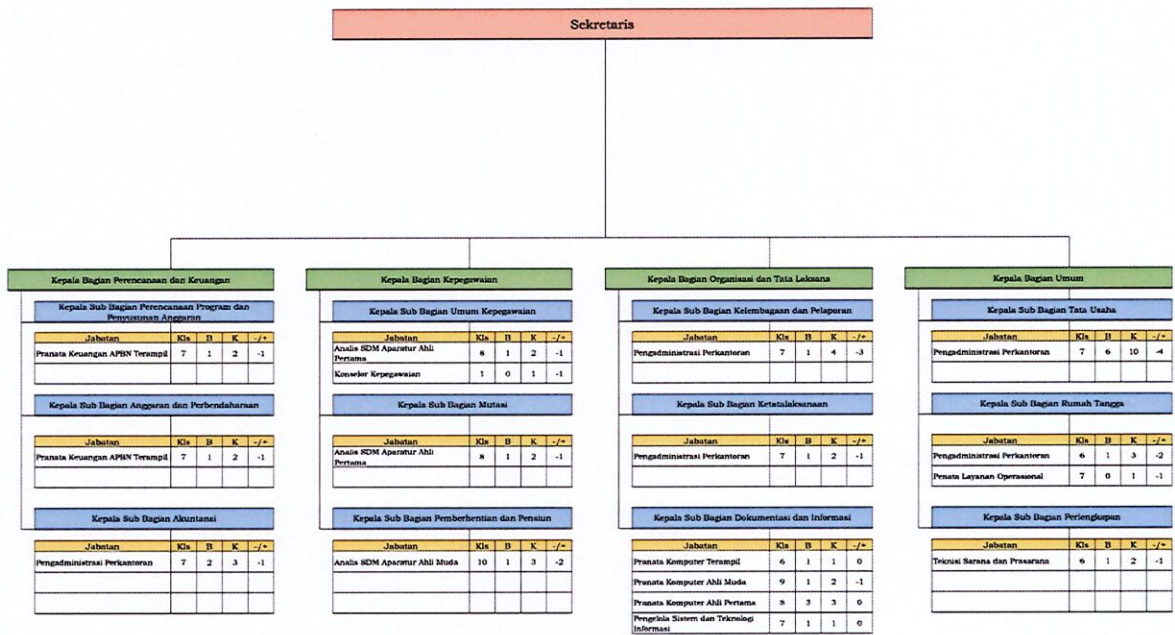
No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)			
										Sifat Hub.	Tujuan Hub.						
20	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
21	Inspektur Wilayah II	15	3600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	3	975
22	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah II	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
23	Inspektur Wilayah III	15	3600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	3	975
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah III	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310
25	Inspektur Wilayah IV	15	3600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	5	650	3	975
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV	10	1825	2	350	2	250	1	450	2	50	2	75	3	340	1	310

2. Peta Jabatan

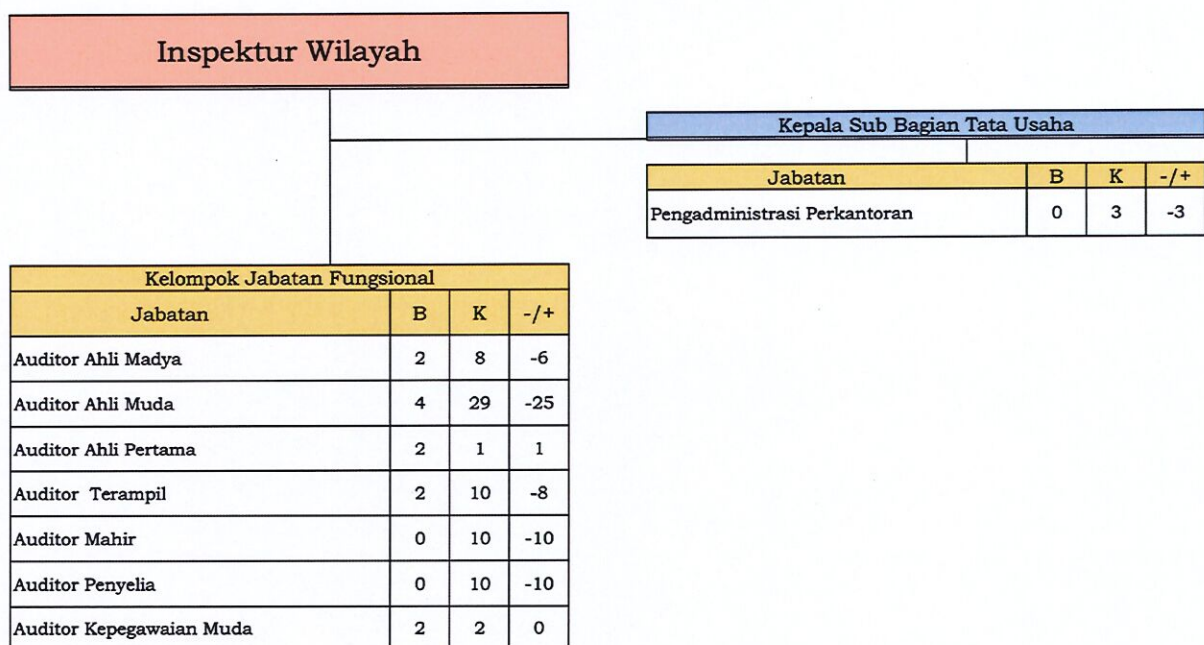
PETA JABATAN BADAN PENGAWASAN



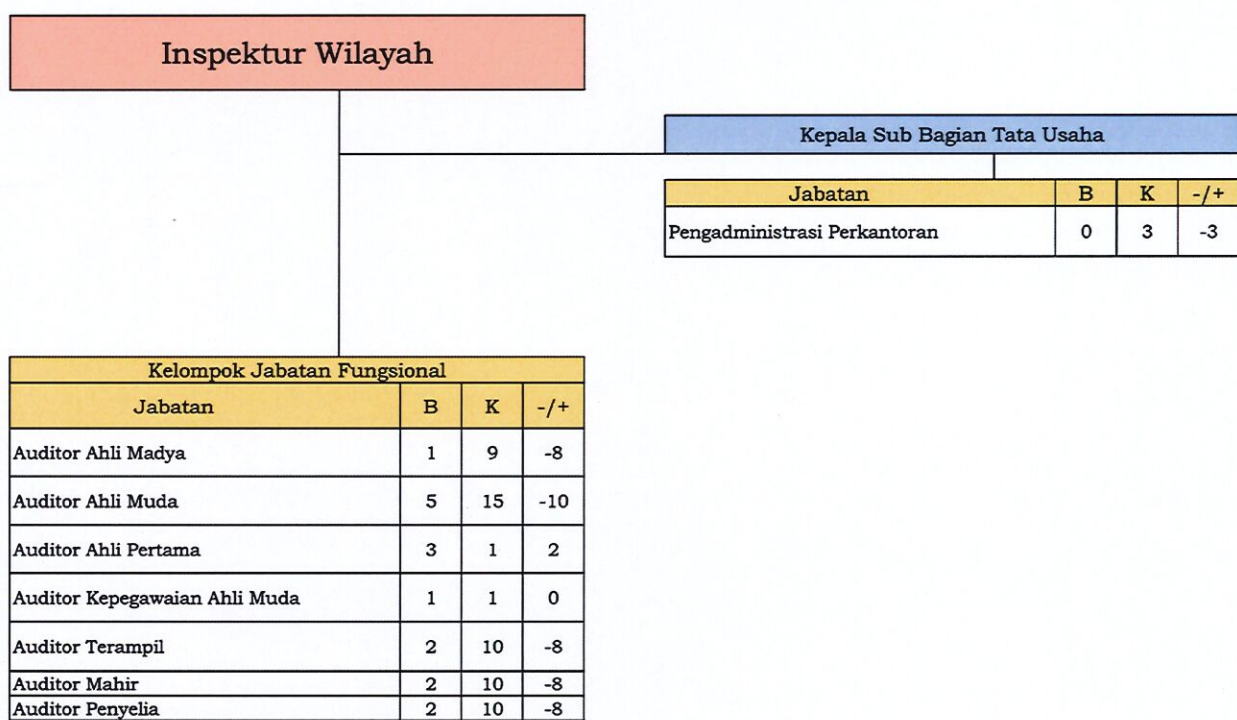
PETA JABATAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN



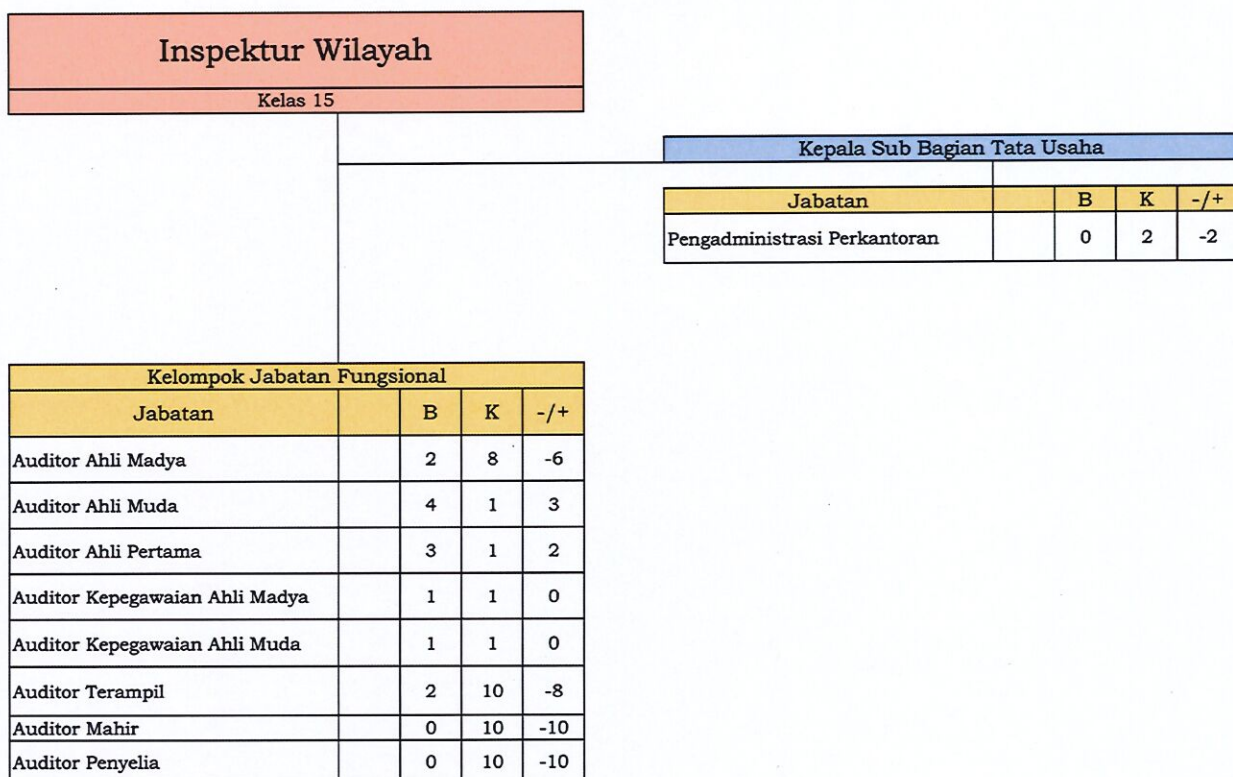
PETA JABATAN INSPEKTORAT WILAYAH I



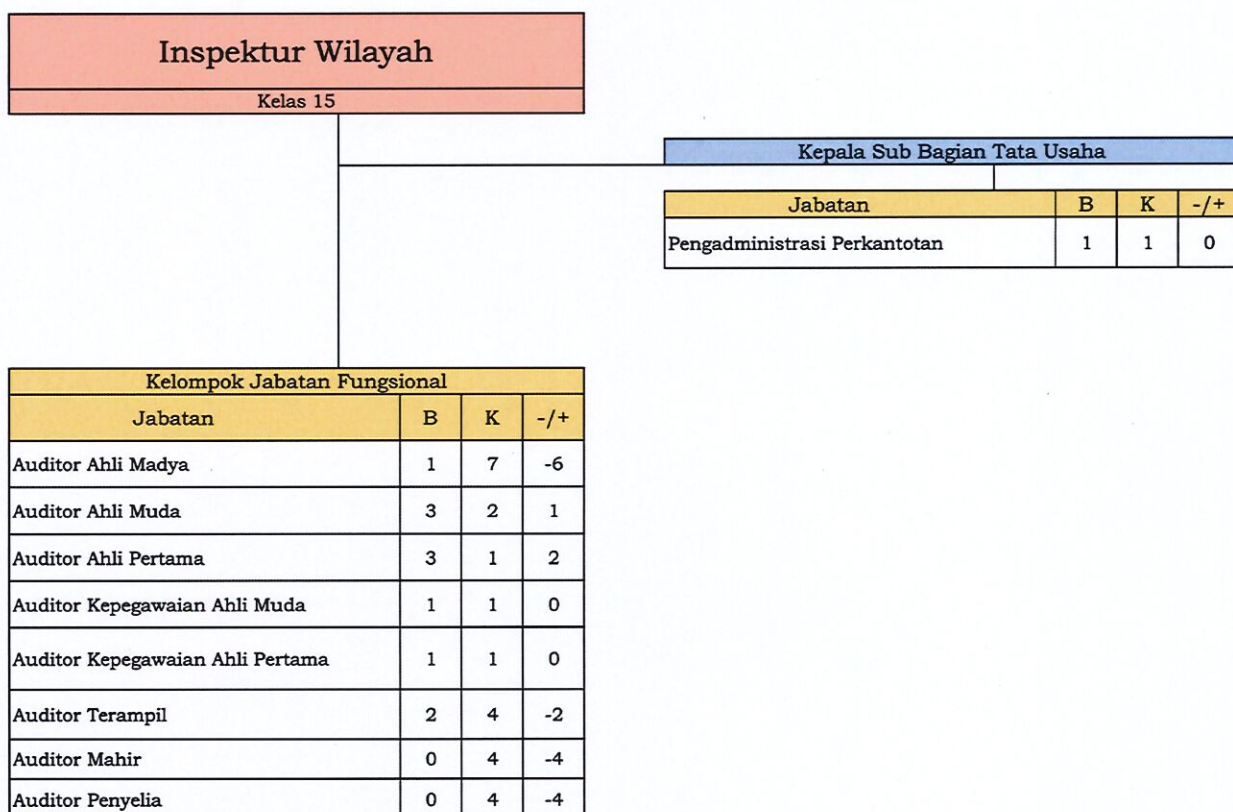
PETA JABATAN INSPEKTORAT WILAYAH II



PETA JABATAN INSPEKTORAT WILAYAH III



PETA JABATAN INSPEKTORAT WILAYAH IV

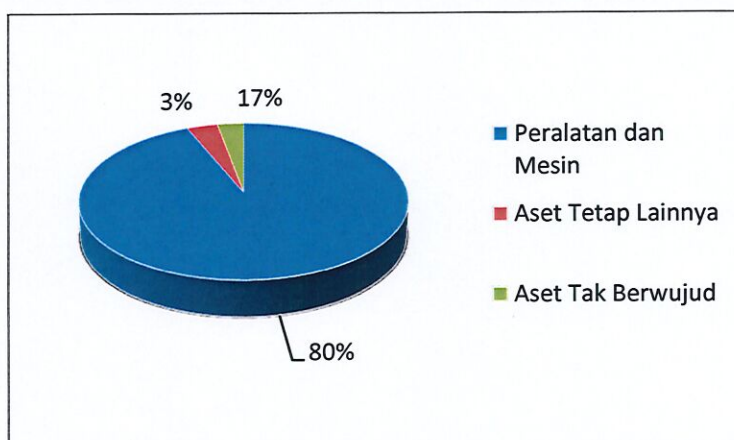


B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 dikelompokkan:

➤ 2.376 unit peralatan dan mesin	Rp. 15.002.253.878
➤ 2.290 unit aset tetap lainnya	Rp. 535.403.685
➤ 104 unit aset tak berwujud	Rp. 461.260.800
Total pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 15.998.918.363

Grafik 1. Persentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan



Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada :

a) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2023 :

1) Pembelian

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2023 adalah 23 Unit dengan Total **Rp 399.998.198** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2. Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	Alat Reproduksi (Penggandaan) Lainnya	2	Rp 4,742,000
2.	Lemari Display	1	Rp 3.700.000
3.	Alat Pemotong Kertas	3	Rp 45.750.000
4.	LCD Projector/Infocus	1	Rp 6.400.000
5.	Meja Komputer	1	Rp 8.960.000
6.	Sofa	1	Rp 27.249.000
7.	Meubelair Lainnya	1	Rp 8.169.000
8.	Televisi	2	Rp 7.461.500
9.	Equalizer	1	Rp 8.600.000
10.	Loudspeaker	6	Rp 36.230.000
11.	Vertikal Blind	1	Rp 19.508.000
12.	Kabel	1	Rp 3.683.998
13.	Audio Amplifier	1	Rp 6.800.000
14.	Power Amplifier	1	Rp 28.900.000
15.	P.C Unit	1	Rp 19.200.000
16.	Auto Switch/Data Switch	1	Rp 11.086.200
17.	Peralatan Komputer Lainnya	6	Rp 12.210.000
18.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Rp 22.716.000
19.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp 5.300.000
20.	Router	6	Rp 24.000.000
21.	Switch Rak	1	Rp 4.500.000
22.	Wireless Access Point	29	Rp 91.350.000
23.	Switch	1	Rp 5.242.500
TOTAL		79	Rp399.998.198

2) *Transfer* Masuk

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari *Transfer* Masuk tahun anggaran 2023 berjumlah 5 Unit *Notebook* dengan Total **Rp 85.002.500** (delapan puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah), yang diperuntukkan untuk Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Pengguna *Notebook*

NUP	Pemegang
1	Hendra Ramadhani
2	Yusuf
3	Ferri T.F
4	Muhammad Anis
5	Nurdiansyah

3) *Transfer* Keluar

Tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pelepasan aset berupa *transfer* keluar Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang) sebanyak 1 unit dengan total penyusutan/pengurangan nilai aset sebesar **Rp 347.600.000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Barang Milik Negara (*Transfer* Keluar)

No	Uraian	NUP	Satker Tujuan	No SK	Nilai
1.	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang)	1	Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI	2200/SEK /SK/XII/2 022	Rp 347.600.000
TOTAL					Rp 347.600.000

4) Barang Persediaan Barang Konsumsi

Melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan pengadaan triwulan sebagai dasar penyusunan kebutuhan belanja kebutuhan barang konsumsi/ATK. Adapun rincian pembelian ATK selama periode dari Januari sampai dengan Desember 2023 sebagai berikut :

**TABEL 5. PEMBELIAN BARANG PERSEDIAAN BARANG
KONSUMSI AKUN 521811 - JANUARI S.D. DESEMBER 2023
PADA BADAN PENGAWASAN MA RI.**

No	Bulan	No Faktur	Jumlah
1	Januari	-	-
2	Februari	006/AK/FT/II/2023	Rp 49.560.000
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	014/AK/FT/V/2023	Rp 35.939.200
6		015/AK/FT/V/2023	Rp 39.681.200
7	Juni	020/AK/FT/VI/2023	Rp 37.572.800
8	Juli	-	-
9	Agustus	025/AK/FT/VIII/2023	Rp 7.700.000
10		026/AK/FT/VIII/2023	Rp 8.505.000
11		027/AK/FT/VIII/2023	Rp 7.700.000
12		028/AK/FT/VIII/2023	Rp 6.195.000
13	September	030/AK/FT/IX/2023	Rp 35.032.000
14	Oktober	030/PR/FT/X/2023	Rp 54.000.000
			Rp 48.949.000
			Rp 6.466.000
			Rp 7.972.000
			Rp 6.466.000
			Rp 4.960.000
15	November	-	Rp 5.870.000
			Rp 17.293.000
			Rp 5.815.000
			Rp 1.331.000
			Rp 16.183.000
			Rp 7.331.000
			Rp 5.206.000
			Rp 5.711.000
			Rp 24.607.000
16	Desember	077/AK/FT/XII/2023	Rp 8.070.000
		079/AK/FT/XII/2023	Rp 35.667.000
			Rp 22.300.000
JUMLAH			Rp 512.082.200

- 5) Melaksanakan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan SK Penetapan Status Penggunaan Nomor 362/SEK/SK/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebanyak 77 unit dan SK Penetapan Status Penggunaan Nomor 890/SEK/SK.PL1.2/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 78 unit.
- 6) Melaksanakan usul pengajuan penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara sebanyak 102 jenis BMN dengan kondisi rusak berat sesuai dengan Surat Persetujuan Penjualan BMN yang

dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 571/SEK/PL1.2/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.

b) Pemeliharaan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sebagian besar hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 2.376 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

1) Pemeliharaan Alat Kantor

Pemeliharaan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Pemeliharaan Alat Kantor

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Kondisi
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	8 unit	Baik
2	Alat Kantor	633 unit	Baik
3	Alat Rumah Tangga	1088 unit	Baik
4	Alat Studio	56 unit	Baik
5	Alat Komunikasi	56 unit	Baik
6	Peralatan Pemancar	7 unit	Baik
7	Komputer Unit	233 unit	Baik
8	Peralatan Komputer	292 unit	Baik
9	Peralatan Olah Raga	3 unit	Baik
Aset Tetap Lainnya			
1	Bahan Perpustakaan Tercetak (Monografi)	2290 unit	Baik
Software			
1	Aset Tak Berwujud	12 unit	Baik

2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Adapun data kendaraan dinas/operasional yang telah dilakukan pemeliharaan di Badan Pengawasan antara lain:

Tabel 7. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

No	Jenis Kendaraan	Merek	Type	No. Polisi	Keterangan
1	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2311 UII	Sewa
2	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2204 UII	Sewa
3	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2202 UII	Sewa
4	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2313 UII	Sewa
5	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1529 PQN	BMN
6	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1232 PQO	BMN
7	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1540 PQN	BMN
8	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1665 PQO	BMN
9	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1667 PQO	BMN
10	Roda Empat	Toyota	Hiace	B 7955 UDA	Sewa
11	Roda Empat	Toyota	Hiace	B 7096 UDB	Sewa
12	Micro Bus	Hyundai	HD Mighty	B 7523 IO	BMN
13	Roda Dua	Honda	Mega Pro	B 4883 PQ	BMN
14	Roda Dua	Honda	Mega Pro	B 4823 PQ	BMN
15	Roda Dua	Honda	Mega Pro	B 6256 PEQ	BMN
16	Roda Dua	Yamaha	Vixion	B 6511 PSQ	BMN

2.1 Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas operasional yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Badan Pengawasan MA RI adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua)

No	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1	Honda GL Pro III	1	2009	B 4883 PQ	Baik
2	Honda GL Pro III	2	2009	B 4823 PQ	Rusak Berat
3	Honda GL Pro III	3	2009	B 6256 PEQ	Baik
4	Yamaha Vixion	4	2012	B 6511 PSQ	Baik

Tabel 9. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)

No	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1	Toyota Kijang Innova e m/t/Toyota Kijang Innova e m/t	6	2009	B 1529 PQN	Baik
2	Toyota Kijang Innova e m/t/Toyota Kijang Innova e m/t	7	2009	B 1540 PQN	Baik
3	Toyota Kijang innova/Kijang Innova G	8	2010	B 1232 PQO	Baik
4	Toyota Kijang Innova E	9	2011	B 1665 PQO	Baik

5	Toyota Kijang Innova E	10	2011	B 1667 PQO	Baik
---	---------------------------	----	------	------------	------

**Tabel 10. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)
Pinjam Pakai**

Biro Umum Badan Urusan Administrasi MA RI dengan BAST Nomor 032/BUA.7/RT.1/BAST/BMN/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 dan BAST Nomor 239/BUA.7/RT/BAST/BMN/4/2019 tanggal 29 April 2019 sebagai berikut :

No	Merk/Type	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1	Toyota Hiace Commuter MT	-	2019	B 7955 UDA	Baik
2	Toyota Hiace Commuter MT	-	2021	B 7096 UDB	Baik

Pada Semester I Tahun Anggaran 2023 terdapat 1 (satu) unit kendaraan operasional kendaraan Micro Bus yang telah dialih statuskan ke Biro Umum Mahkamah Agung RI yaitu antara lain :

Tabel 11. Kendaraan Operasional Kendaraan Roda Empat

No	Status Operasional	Jenis Kendaraan	Merek	Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	Keterangan
1	Operasional Umum	Micro Bus	Hyundai	HD Mighty	2009	B 7523 IO	BMN

Sehingga biaya terhadap pemeliharaan kendaraan yang telah dialihstatuskan ke satker beralih ke kendaraan dinas operasional lainnya.

Untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada tahun 2023 telah dilakukan terhadap 4 (empat) unit Xpander. Adapun pemeliharaan tersebut berupa pengisian BBM kendaraan dinas operasional masing-masing Kepala Bagian (eselon 3) dengan budget yang diberikan Unit Bagian Keuangan Badan Pengawasan MA RI sebesar Rp1.500.000/bulan.

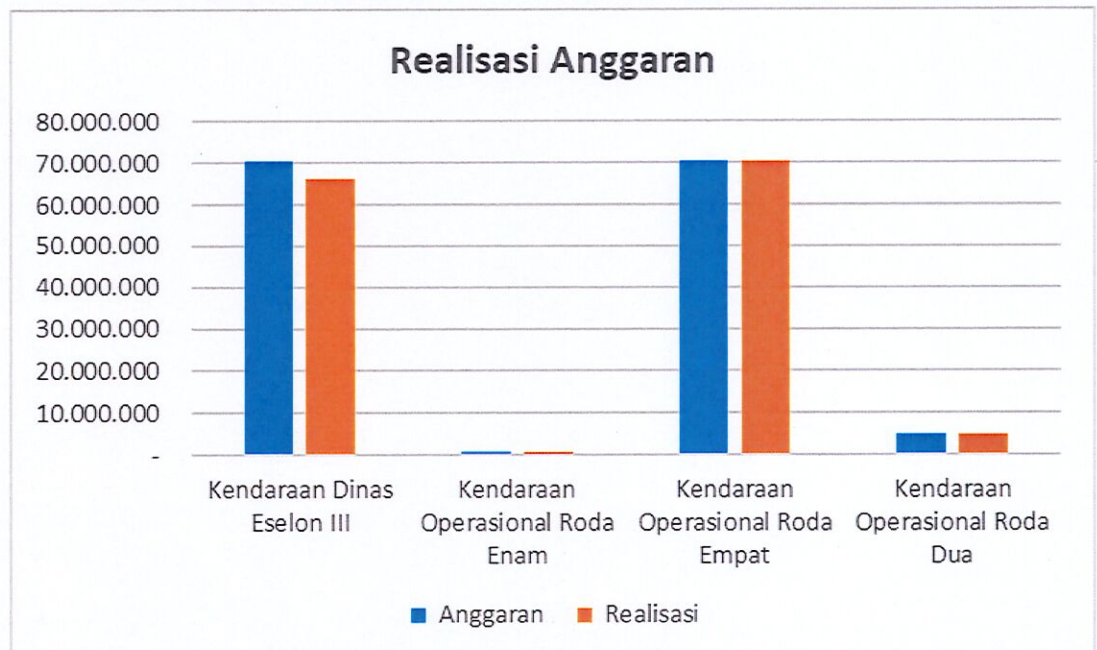
Sedangkan perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas operasional pada tabel di atas selain kendaraan dinas yang melekat jabatan eselon 3 antara lain yaitu pengisian BBM, service berkala, penggantian ban, oli mesin maupun sparepart.

Adapun perincian untuk biaya pemeliharaan dan perawatan masing-masing kendaraan dinas operasional pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merek	Type	No. Polisi	Biaya yang Telah Diserap
1	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2311 UII	17.147.300
2	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2204 UII	18.000.000
3	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2202 UII	14.916.600
4	Roda Empat	Mitsubishi	Xpander	B 2313 UII	16.200.211
5	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1529 PQN	29.904.492
6	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1232 PQO	12.049.816
7	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1540 PQN	9.203.734
8	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1665 PQO	9.067.890
9	Roda Empat	Toyota	Innova	B 1667 PQO	10.255.682
10	Micro Bus	Hyundai	HD Mighty	B 7523 IO	640.000
11	Roda Dua	Honda	Mega Pro	B 4883 PQ	1.644.000
12	Roda Dua	Honda	Mega Pro	B 4823 PQ	59.000
13	Roda Dua	Honda	Mega Pro	B 6256 PEQ	1.685.790
14	Roda Dua	Yamaha	Vixion	B 6511 PSQ	1.564.596
Total					142.339.111

Grafik 1. Realisasi Anggaran Perawatan Kendaraan Dinas Operasional



3) Layanan Operasional

Pengadaan Kebutuhan/Keperluan Perkantoran (Belanja Barang) :

Tabel 13. Layanan Operasional

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
1	Pengadaan Keperluan Pokok Pegawai (Air Minum, Majalah/Koran, dll)	12 bulan
2	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	27 paket
3	Pengadaan Kalender Dinding BAWAS	200 paket
4	Pengadaan Pakaian Dinas Putih MA	179 paket
5	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	12 bulan
6	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan

7	Pengadaan Provider Internet	12 bulan
8	Pengadaan Provider Internet Server/Backup	12 bulan

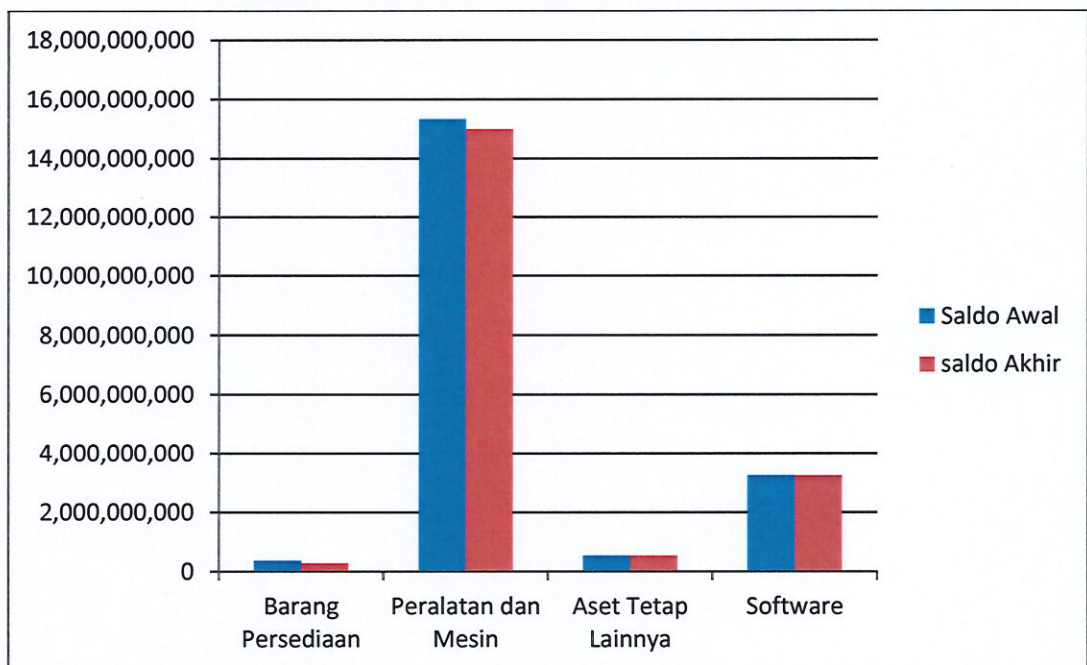
c) Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Badan Pengawasan sebesar Rp 296.780.543 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) jumlah tersebut terdiri dari:

- Saldo awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp 355.269.203 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah).
- Total pembelian persediaan selama tahun 2023 sebesar Rp 446.045.200 (empat ratus empat puluh enam juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Total distribusi sebesar Rp 504.533.860 (lima ratus empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI T.A 2023 dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. Pengelola Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara



HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tujuan dari dilakukannya Opname Fisik Barang Persediaan untuk memastikan kesamaan antara data di Aplikasi Persediaan dengan jumlah barang yang riil, yang rinciannya sebagai berikut :

Tabel 14. Register Transaksi Harian Barang Persediaan Tahun 2023

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAH MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 1 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	101020001	00001	Batu Bateray Alkalin	SET	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00001	BOLL POINT FASTER	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00002	Pulpen Gol (Uniball)	Buah	2023-12	22
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00003	PENSIL 2B	BUAH	2023-12	23
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00004	SPIDOL MARKER BIRU	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00005	STABLO BOSS (WARNA WARNI)	BUAH	2023-12	14
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00006	SPIDOL WHITEBOARD	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00007	PULPEN FASTER TUTUP (C600)	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00008	BUKU EKSPEDISI	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00009	SPIDOL KECIL WARNA WARNI	Set	2023-12	1
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00010	SHOWMAN V3 BALLPOINT	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00011	UNIBALL BOXY	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00012	OrdnerGungyu401	buah	2023-12	8
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00013	Ordner Gungyu 403	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00014	Ballpoint Signe	buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00015	Pulpen Kenko	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00016	Pulpen Joyko Gol warna biru	BUAH	2023-12	56
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00017	BOLPOINT JOYKO WARNA HITAM	BUAH	2023-12	25
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00018	BATERAI ABC BESAR	SET	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	00019	Ballpoint Ballner	Buah	2023-12	8

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP

Tanggal : 11-01-2024

UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman : 2 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000020	Pulpen Unibel Get Impact	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000021	Map Merah Logo	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000022	Map Kuning Logo	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000023	Map Hiasu Logo	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000024	Map Biru Logo	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000025	Map Orange Logo	Lembar	2023-12	478
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000026	Pensil HB	Buah	2023-12	6
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000027	Pulpen Kanko Gel Hitam	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000028	Ballpoint C8 Fastier	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000029	Pensil Mekanik Rotring	Buah	2023-12	22
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000030	Isi Pensil Rotring 0.5	Kotak	2023-12	42
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000031	Jovito Pen Stand	Buah	2023-12	2
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000032	Ballpoint Promosi	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000033	Pulpen Fastier F6	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000034	Ballpoint Fastier EC8	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000035	Pulpen Scotch Magic	Buah	2023-12	6
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000036	Ballpoint Fastier C6	Buah	2023-12	81
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000037	Pulpen Hero 956	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000038	Spidol Permanen	Buah	2023-12	28
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000039	Pulpen 4 warna	Buah	2023-12	15

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP

Tanggal : 11-01-2024

UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman : 3 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000040	Pulpen Pantel Palantkan	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000041	Snowman VS Hitam	buah	2023-12	25
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000042	Pulpen ponghepus	buah	2023-12	6
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000043	Ballpoint Pantel RS3 Original	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000044	SPIDOL KECIL BIRU	Buah	2023-12	3
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000045	SPIDOL KECIL HITAM	Buah	2023-12	7
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000046	Map Hiasu Embosa Emas	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000047	Map Emas Keuangan	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000048	Map Logo Sekretariat	Lembar	2023-12	75
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000049	Pulpen Pilot Faxon Ball Blue	Buah	2023-12	113
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000050	Pulpen Unibel Impact RT Blue	Buah	2023-12	132
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000051	Map Merah Logo Glossy	Lembar	2023-12	935
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000052	Map Biru Logo Glossy	Lembar	2023-12	505
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000053	Map Hiasu Logo Glossy	Lembar	2023-12	510
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000054	Map Kuning Logo Glossy	Lembar	2023-12	414
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000055	Buku Foleo Expedisi	Buah	2023-12	7
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000056	Buku Kwarto	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000057	Buku Expedisi	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000058	Buku Expedisi Kwarto	Buah	2023-12	2
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301001	000059	Pulpen Pilot Faxon Ball Black	Buah	2023-12	109

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 4 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301002	000001	Stempel	bh	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301002	000002	Stempel Perma	bh	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301002	000003	Stempel Colop	bh	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301002	000004	Tinta Colop	bh	2023-12	7
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301002	000005	Tinta Maro	Botol	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301002	000006	Isi Pulpen Partel Pelantikan	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000001	PAPER CLIP	Kotak	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000002	BINDER CLIP 107	Kotak	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000003	BINDER CLIP 155	Kotak	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000004	KLIP	DUS	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000005	BINDER CLIP 111	Kotak	2023-12	5
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000006	BINDER KLIP 100	Kotak	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000007	BINDER CLIPS NO 269	Kotak	2023-12	31
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000008	Binder Clip 200	kotak	2023-12	30
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000009	PAPER CLIP WARNA	Kotak	2023-12	51
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000010	PUSH PIN	Kotak	2023-12	23
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000011	Pembolong Kertas	Buah	2023-12	3
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000012	Acco Bessli	Sel	2023-12	999
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000013	Stand Book	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000014	Binder Clip 105	Kotak	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 5 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000015	Spiral plastik UK 1 4	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000016	Spiral plastik UK 5 15	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000017	Spiral plastik UK 3 8	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000018	Spiral plastik UK 7 15	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000019	Spiral plastik UK 1 2	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000020	Spiral plastik UK 9 15	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000021	Spiral plastik UK 5 8	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000022	Spiral plastik UK 3 4	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000023	Spiral plastik UK 1	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000024	Spiral plastik UK 1 4	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000025	Spiral plastik UK 1 1 8	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000026	Spiral plastik UK 1 1 2	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000027	Spiral plastik UK 1 3 4	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000028	Spiral plastik UK 2	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000029	Paper clip No 5 (Jumbo)	Kotak	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000030	Binder Clip 107	Box	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000031	Binder Clip Jumbo No 5	Box	2023-12	7
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301003	000032	Binder Clip 269	Box	2023-12	4
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	000001	PENGHAPUS MESIN KETIK IBM	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	000002	PENGHAPUS PENSIL	BUAH	2023-12	14

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 6 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	00003	TIP-X PANTEL	BUAH	2023-12	36
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	00004	PENGHAPUS MESIN KETIK	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	00005	Penghapus Pulpon	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	00006	Penghapus Whiteboard	Buah	2023-12	2
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	00007	Stabilo Swing Boss	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301004	00008	Tip ex Cornobon	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00001	BUKU REGISTER BESAR	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00002	BUKU REGISTER SEDANG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00003	BUKU REGISTER KECIL	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00004	BUKU REGISTER PANJANG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00005	BUKU PENGAWASAN KREDIT	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00006	BUKU TANDA TERIMA LHP	BUKU	2023-12	53
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00007	BUKU BON PERMINTAAN ATK	Buku	2023-12	19
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00008	Dokumen Pengaduan	Dus	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00009	Standard buku ILMAX	sat	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00010	buku agenda foto 500	buah	2023-12	7
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00011	buku agenda foto 200	buah	2023-12	11
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00012	buku agenda foto 100	buah	2023-12	6
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00013	Formulir Hasil Penelahaan	Buku	2023-12	2
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00014	Tanda Terima Surat	Buku	2023-12	49

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 7 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00015	Peminjaman Inventaris	Buku	2023-12	4
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00016	Not Box	Buku	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00017	Kwitansi	Buku	2023-12	3
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301005	00018	Buku Daftar Temu	Buku	2023-12	26
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00001	STOP MAP	DUS	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00002	MAP SWELHECKTER	LEMBAR	2023-12	5
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00003	ODNER	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00004	BOX FILE	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00005	MAP LHP	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00006	MAP BIASA	Lembar	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00007	RADO ARCH FILE	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00008	MAP TULANG BADAN PENGAWASAN	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00009	MAP BLUDRU	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00010	Box File LHP Pakai Tulup	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00011	Spring File Plastik	Lembar	2023-12	152
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00012	Box File Bentex	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00013	Clear Holder F4	Buah	2023-12	13
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00014	Ordner Bentex Foto	Buah	2023-12	71
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00015	Businis File Plastik	Lembar	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	00016	Map Snelhecter Plastik	Lembar	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663138.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 8 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000017	Dokuman Kesper Sorni Kulit	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000018	Notepad Holder Kulit	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000019	Map Plastik L	Lembar	2023-12	10
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000020	Map epno pengaduan	Lembar	2023-12	1.000
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000026	MAP PLASTIK TAL	LEMBAR	2023-12	3
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000027	Map Hesu Embosse Emas	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000028	Map Sokretanal MKH Glossy	Lembar	2023-12	500
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301006	000029	Map Clear Sleeve joyko F4	Lembar	2023-12	91
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301007	000001	PENGGARIS BESI 30 CM	BUAH	2023-12	22
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301007	000002	PENGGARIS PLASTIK 30 CM	BUAH	2023-12	1
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301007	000003	Penggaris Gasi 50 cm	Buah	2023-12	6
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000001	GUNTING BESAR KECIL SEDANG	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000002	CUTTER BESAR (L - 500)	BUAH	2023-12	20
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000003	GUNTING 838 (SEDANG)	BUAH	2023-12	11
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000004	GUNTING 848 (BESAR)	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000005	Cutter A-300	BUAH	2023-12	21
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000006	Senatan Ponsil	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000007	Isp Cutter A-300	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000008	Senatan Mojo Ponsil	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000009	Isp Cutter Keol A300	Box	2023-12	1

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 9 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301008	000010	Gunting 828 (Kecil)	Buah	2023-12	32
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301009	000001	PITA MESIN KETIK IBM	BUAH	2023-12	12
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301009	000002	PITA MESIN KETIK MAJUAL	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301009	000003	PITA MESIN KETIK ROYAL	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000001	LEM KERTAS	BOTOL	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000002	LEM HIDRAKOL	BOTOL	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000003	LEM GLUE	BOTOL	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000005	DOUBLE SELOTIP	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000006	SINGLE SELOTIP	Buah	2023-12	12
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000007	LEM BANTENG	KALENG	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000008	LEM JOYKO CAJR	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000009	Lem Daler Fwal	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000010	Lem Glue Stick	Buah	2023-12	43
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000011	Dispenser Tape	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000012	Page Marker Assorted 3M	Pad	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000013	Post It Sign Here 3M	Pad	2023-12	90
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000014	Scotch Tape Magic	Buah	2023-12	5
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000015	Post It Note Tape Flag 3M	Pad	2023-12	1
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000016	Post it tape flag warna warni	pad	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000017	Post IT 654 Warna	Pad	2023-12	40

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 10 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000018	Double selotip 3M	Buah	2023-12	21
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000019	Post It Sign Marker 3M 670	Pad	2023-12	1
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000020	MARK II NOTES POST IT PRONTO	BUAH	2023-12	35
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000021	Double selotip sedang	Buah	2023-12	5
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000022	Double selotip kecil	Buah	2023-12	27
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000023	Double Tape Busa 3 M	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301010	000024	Post It Page Marker Warna	Pad	2023-12	24
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301011	000001	STAPLER HD 10 MAX	BUAH	2023-12	17
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301011	000002	STAPLER HD 50 MAX	BUAH	2023-12	8
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301011	000003	Stapler Remover	Buah	2023-12	5
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301011	000004	Staples Mini No 10	Buah	2023-12	22
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301012	000001	Staples HD 12 H 24	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301013	000001	Isi Staples 1213 Max	Kotak	2023-12	20
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301013	000002	Isi Staples 1210 Max	Kotak	2023-12	41
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301014	000001	Buku Peran Adh Hakim di Perkara Perdata	Buku	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301014	000002	Buku Pemulihan Peradilan	Buku	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000001	STABLO BOSS	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000002	ISI STRAPLER NO. 3-1M	Kotak	2023-12	211
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000003	ISI STRAPLES NO. 10-1M	Kotak	2023-12	63
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000004	ISI STRAPLER NO. 9 16	Kotak	2023-12	6

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 11 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000005	ISI STRAPLER NO. 5 8	Kotak	2023-12	15
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000006	ISI CUTTER BESAR	Kotak	2023-12	39
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000007	KALKULATOR CASIO	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000008	CLIFBOARD PLASTIK	BUAH	2023-12	4
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000009	PAPER TRAY	BUAH	2023-12	3
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000010	Desk Organizer	Set	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000011	DATA BAG EAGLE 305	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000012	Papan Whiteboard	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000013	Pembolong No. 85B Kenko	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000014	Papan Whiteboard 45x60	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000015	Joyko Humbering	Unit	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000016	Tas rekor	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010301999	000017	Kantong Pimsil	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302001	000001	KERTAS HVS 70 GRAM A4	RM	2023-12	65
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302001	000002	KERTAS HVS 70 GRAM F4	RM	2023-12	226
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302001	000003	KERTAS HVS 80NGRAM A4	RM	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302001	000004	Kertas HVS A3	Rim	2023-12	1
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000001	KERTAS FAX	ROLL	2023-12	13
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000002	KERTAS LEMBAR DISPOSISI	RM	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000003	Kertas Memo Kecil	Buku	2023-12	10

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 12 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000004	Kertas Memo Besar	Buku	2023-12	7
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000005	Blanko Kartu Persediaan	br	2023-12	300
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000006	Kartu Barabai	br	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000007	POST IT 854	BUAH	2023-12	24
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000008	LABEL T J A4	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000009	Box Arasp Kardus	Lembar	2023-12	38
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000010	Kertas Label TomSellery	Pak	2023-12	238
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000011	Glossy Photo Paper	Pak	2023-12	3
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000012	Glossy Photo Sliter	Pak	2023-12	4
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000013	Tissu Kotak	Kotak	2023-12	146
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000014	Tissu Rol	Roll	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302002	000015	Memo dan Disposisi Kabawas	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302003	000001	SAMPUL KERTAS BELAKANG	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302003	000002	KERTAS FILM F4	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302003	000003	KERTAS COVER	Lembar	2023-12	4,469
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302003	000004	KERTAS COVER F4	Lembar	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302003	000005	kertas cover A4	Lembar	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302004	000001	AMPLOP DINAS KECIL	BUAH	2023-12	870
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302004	000002	AMPLOP PUTIH NO. 110	PAK	2023-12	1
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302004	000003	AMPLOP PUTIH NO. 90	PAK	2023-12	15

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 13 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302004	000004	AMPLOP DINAS BESAR	LEMBAR	2023-12	500
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302004	000005	AMPLOP DINAS BERTELINGA	lembar	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302004	000006	AMPLOP COKLAT POLOS FOLIO BERTALI	lembar	2023-12	82
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000001	KOP GARUDA TENGAH POLS	RIM	2023-12	1
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000002	KERTAS KOP SURAT TUGAS	RIM	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000003	KERTAS KOP SURAT	RIM	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000004	LEMBAR DISPOSISI	RIM	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000005	KOP SURAT MARI	RIM	2023-12	15
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000006	Kop ST Timbul	Rim	2023-12	13
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000007	Kop Logo Garuda Converter	Rim	2023-12	8
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000008	Kop Garuda Converter Jangkih	Rim	2023-12	1
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302005	000009	Kertas Kop Kepala Badan Emas	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302999	000001	KERTAS PEMBATA A4	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302999	000002	SAMPUL PLASTIK	LEMBAR	2023-12	3,499
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302999	000003	Pembatas Kertas Warna-warni	Rim	2023-12	9
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010302999	000004	Kertas Sertifikat	Lembar	2023-12	1,500
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000001	TINTA PRINT LASER JET 756A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000002	TINTA PRINT LASER JET 7561 A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000003	TINTA PRINT LASER JET 7562 A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000004	TINTA PRINT LASER JET 7563 A	BUAH	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 14 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000005	TINTA STEMPEL	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000006	TINTA CANON 35	BUAH	2023-12	16
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000007	TINTA CANON 35	BUAH	2023-12	28
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000008	KARBON MESIN FAX	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303002	000009	Karbon Fax Panasonic	Buah	2023-12	5
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303003	000001	Huruf Alami	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303003	000002	Backdrop	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000001	LAKBAN HITAM BESAR	BUAH	2023-12	52
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000002	BAHTALAN STEMPEL	BUAH	2023-12	6
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000003	LAKBAN KECIL	BUAH	2023-12	34
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000004	LAKBAN SEDANG	BUAH	2023-12	29
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000005	BOLL POINT FASTER	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000006	LAKBAN BEHING	BUAH	2023-12	42
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000007	LAKBAN COKLAT	BUAH	2023-12	36
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000008	CELOTAPE	ROL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000009	LEM AIBON	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010303999	000010	Gunting besar	bn	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304001	000001	Kertas Continuous Form 9 1 1x1 PLY	Box	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304003	000001	Pita Epson LQ 2190	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000001	TINTA 94 (BLACK)	BUAH	2023-12	3

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 15 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000002	TINTA 95 (COLOR)	BUAH	2023-12	3
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000003	TONER HP 12 A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000004	TINTA HP DESKJET T95	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000005	TINTA PRINTER HP LASERJET 2700	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000006	TINTA HP DESKJET T94	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000007	TINTA PRINTER LASERJET 756A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000008	TINTA PRINTER LASERJET 7561A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000009	TINTA PRINTER LASERJET 7562A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000010	TINTA PRINTER LASERJET 7563A	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000011	TINTA HP 57	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000012	TINTA HP 56	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000013	TINTA CANON FW 3	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000014	TONER HP 85 A	BUAH	2023-12	20
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000015	Tinta Epson L800 Hitam	Botol	2023-12	9
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000016	Tinta HP P3015	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000017	Tinta Xerox Phaser 3428	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000018	Osta Print Hitam (Canon Teles)	Kotak	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000019	Osta Print Warna (Canon Teles)	Kotak	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000020	TONER HP 12 A REFIL	BUAH	2023-12	41
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000021	TONER HP 85 A REFIL	BUAH	2023-12	39

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 16 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000022	Tinta Epson L800 Magenta	Buah	2023-12	12
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000023	Tinta Epson L800 Yellow	Buah	2023-12	5
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000024	Tinta Epson L800 Cyan	Buah	2023-12	9
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000025	Tinta Epson L800 Light Cyan	Buah	2023-12	9
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000026	Tinta Epson L800 Light Magenta	Buah	2023-12	6
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000027	Tinta HP 98 (Black)	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000028	Toner brother Black	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000029	Toner Brother Cyan	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000030	Toner Brother Magenta	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000031	Toner Brother Yellow	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000032	Toner Hp 55A	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000033	Toner Xerox warna	set	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000034	Toner Xerox hitam p115w	Buah	2023-12	9
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000035	Tinta HP 62 Hitam	Buah	2023-12	60
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000036	Tinta HP 62 Warna	Buah	2023-12	41
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000037	Tinta Epson L120 Black	Buah	2023-12	28
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000038	Tinta Epson L120 Magenta	Buah	2023-12	19
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000039	Tinta Epson L120 Cyan	Buah	2023-12	19
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000040	Tinta Epson L120 Yellow	Buah	2023-12	23
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000041	Toner HP 48A	Buah	2023-12	8

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 17 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000042	TONER HP 107	BUAH	2023-12	29
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000043	TONER HP 107 (Compatible Chip)	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304004	000044	TONER HP 48 A (Compatible Chip)	BUAH	2023-12	13
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304005	000001	SONY CD RW 700 MB	KEPENG	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304005	000002	SONY RECORDING AF90	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304005	000003	DVD Verbatim	Keping	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000001	USB 2 GB	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000002	FLASH DISK 4 GB	BUAH	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000003	Flash Disc 2 GB	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000004	Flasdisk 8 GB	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000005	Flasdisk 32 GB	Buah	2023-12	107
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000006	USB Hub	Unit	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000007	name tag flasdisk	buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304006	000008	Flasdisk 16 GB	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304010	000001	Mouse Wireless	Buah	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304010	000002	Mouse silent click Logitech M350	Buah	2023-12	4
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304011	000001	CD Rakor	Keping	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304011	000002	DVD RW	kepeng	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000001	Kabel Data	Sol	2023-12	0
00507019963136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000002	MOUSE PAD	BUAH	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP

Tanggal : 11-01-2024

UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman : 18 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000003	Kabel Power	Set	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000004	Kabel HDMI	Set	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000005	Hardisk Eksternal	Unit	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000007	MOUSE	UNIT	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010304999	000008	Cooler Master Notebook	unit	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305001	000001	SIKAT CUCI	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305001	000002	KEMOCENG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305001	000003	SIKAT TOILET	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305001	000004	SAPU LUK	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000001	WIPER LANTAI	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000002	KAIN SERBET	HELAI	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000003	HANDUK	HELAI	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000004	TISSUE KOTAK	PAK	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000005	TISSUE ROLL	ROLL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000006	KAIN PEL BATANG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000007	Pembilas Lantai Panjang	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000008	WIPER KACA	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000009	Tissue basah Tabung	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305002	000015	Tissue basah Peseo Lidah Bunsyi	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305003	000001	EMBER BESAR	BUAH	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP

Tanggal : 11-01-2024

UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman : 19 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305003	000002	EMBER SEDANG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305003	000003	GAYUNG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305004	000001	KARPET KARET	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305004	000002	DUST COTTON MAP	PAK	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305004	000003	HANDUK KESEY	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305004	000004	TEMPAT SAMPAH TUTUP	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305004	000005	Kasot	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305004	000006	PLASTIK SAMPAH	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305006	000001	TALI RAMI	ROLL	2023-12	13
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305006	000002	TALI RAFIA	ROLL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000001	PEWANGI LANTAI	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000002	SABUN CUCI	PAK	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000003	PORSELEN PEMBERSIH	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000004	HAND SOAP	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000005	PEMBERSIH KACA	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000006	PORSTEX	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000007	PEMBERSIH LANTAI	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000008	ISI AEROSOL	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000009	SABUN CUCI SUNLIGHT BOTOL	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000010	SABUN CUCI SUNLIGHT BIASA	BUNGKUS	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 20 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000011	HANDYMOF	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000012	Sabun Mandi	Botol	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000013	Semprot Nyamuk	Botol	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000014	Kamper	pack	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000015	Pembersih Furniture	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000016	Karbol	Botol	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000017	HAND SOAP REFILL	PACK	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000018	HAND SANITIZER	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305008	000019	Bubuk Pembersih Serbaguna	Botol	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000001	HAMPAN	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000002	PISAU BUAH	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000003	SENDOK GARPU	LUSIN	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000004	SENDOK SAYUR	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000007	GELAS KACA GEDE	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000008	PIRING SANGU	DUS	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000009	PIRING	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000010	MANGKOK	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000011	CANGKIR SANGU	SET	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000012	CANGKIR SET	SET	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000013	SENDOK MAKAN	Lusin	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 21 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000014	MANGKOK SOP KERAMIK PUTIH POLOS	LUSIN	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000015	GELAS KACA TINGGI	LUSIN	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000016	GARPU MAKAN	LUSIN	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000001	KAPUR BARUS	BUNGIKUS	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000002	PEWANGI GANTUNG	BUNGIKUS	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000003	BAY FRESH	BOTOL	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000004	MESIN AEROSOL	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000005	CARFRESH	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000006	TOILET BALL	BUNGIKUS	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000007	Mesin Pengharum Ruangan	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000008	Pengharum atas meja	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305012	000009	isi refill glade	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305009	000001	SPONS CUCI PIRING	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305999	000002	KANIBO	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305999	000003	KAIN KASA	LEMBAR	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305999	000004	OBENG	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305999	000005	TROLI KECIL	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305999	000006	TROLI BESAR	BUAH	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010305999	000007	Cover Tutup kabinet	Buah	2023-12	0
005070199663136000KP202300002P	31-12-2023	1010306001	000001	KABEL NYM 2X2,5 50 M	ROLL	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 22 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306001	000002	KABEL ROLL	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306001	000003	KABEL NYM 3X1.5 SO M	ROLL	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306001	000004	KABEL NYM 3 X 2.5 50 M	ROLL	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306001	000005	KABEL NYM HY 2 X 0,75 50 M	ROLL	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306002	000001	LAMPU PHILIP 22 WATT	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306002	000002	LAMPU PHILIP 36 WATT	0	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306003	000001	KABEL COLOKOKAN 5 M	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306004	000001	SAKLAR 4 LUBANG	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306004	000002	SAKLAR 3 LUBANG	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306004	000003	SAKLAR 2 LUBANG	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306006	000001	BALAST	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306010	000001	BATERAI ALKALINE (AA)	SET	2023-12	88
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306010	000002	Batu Baterai Alkaline (AAA)	SET	2023-12	47
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306010	000003	Battery kotak 9 volt	Buah	2023-12	2
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010306009	000001	RUMAH LAMPU DOWM LIGHT	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010307006	000001	Kartu Peserta & Tol	Set	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000001	Buku Agenda Rakor	Buku	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000002	Nem Tac	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000003	Tas Laptop Prodator Cortenz 14	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000004	Tas Laptop Prodig Cortenz RC 14	Buah	2023-12	0

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)
UNTUK PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

KODE UAKPB : 005.07.0199.663136.000.KP
UAKPB : BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal : 11-01-2024
Halaman : 23 dari 23

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000005	Tas Laptop Luorne LT + RC Cortenz 14	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000006	Tas Laptop Iracode Cortenz 14	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000007	Tas Pomeriksaan	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000008	Koper Pembersihan pemeriksaan	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000009	koper pembersihan pemeriksaan 1	Buah	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000010	Materai 3000	Lember	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000011	Materai 6000	Lember	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010399989	000012	KANTONG PLASTIK	Pak	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010401001	000001	OBAT NYAMUK	BOTOL	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010501008	000001	TAS SOSIALISASI	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010501008	000002	TAS JPLING SOSIALISASI	BUAH	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010501008	000003	BUKU MANAJEMEN PENGAWASAN	BUKU	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010501008	000004	BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BUKU	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010501008	000005	BUKU PEMULIAAN PERADILAH BADAN PENGAWASAN	BUKU	2023-12	0
00507019983136000KP202300002P	31-12-2023	1010501008	000006	Buku Pensi Aktif Hakim dalam perkara perdata	Buku	2023-12	0

C. Pengelolaan Keuangan

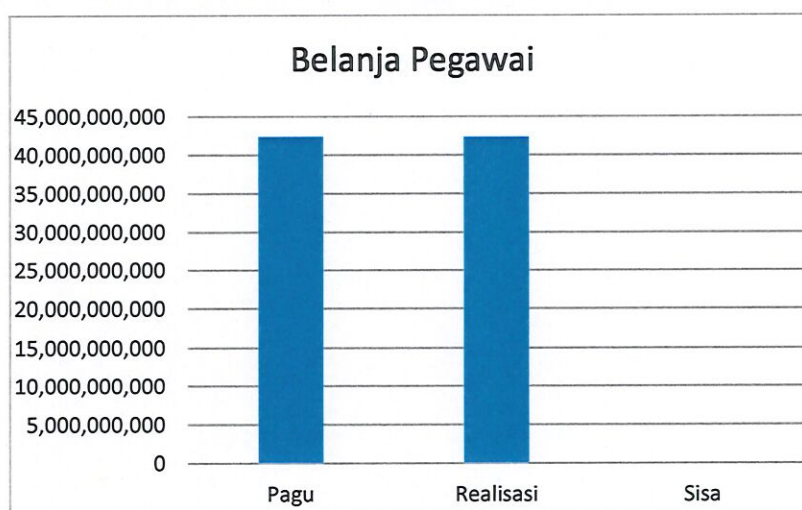
Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07-0.663136/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan jumlah PAGU (REVISI KE - 9 tanggal 20 Desember 2023) sebesar Rp. 77.395.003.000,- terdiri dari:

1. BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2023 yaitu:

- a. Pagu** : **Rp 42.396.872.000 (100%)**
(empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- b. Realisasi** : **Rp 42.375.551.381 (99,95%)**
(empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- c. Sisa** : **Rp 21.320.619 (0,05%),**
(dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Grafik 3. Belanja Pegawai Tahun 2023



2. BELANJA BARANG

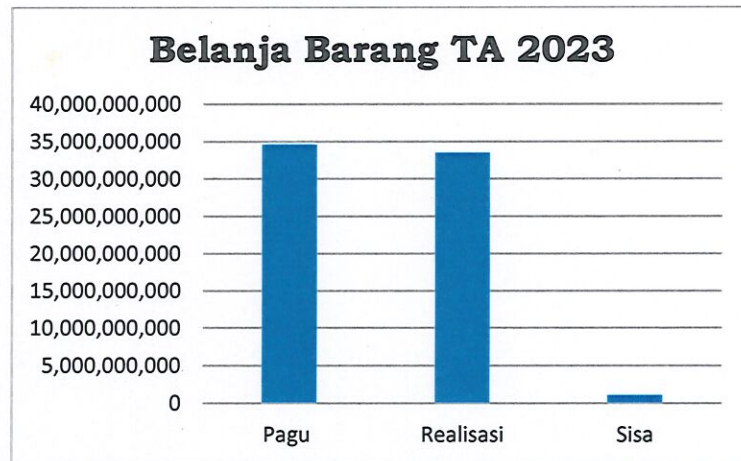
Pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2023 yaitu:

- a. Pagu** : **Rp. 34.598.131.000,-**
(tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- b. Realisasi** : **Rp. 33.504.009.108,-**
(tiga puluh tiga milyar lima ratus empat juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah).

c. Sisa : Rp. 1.094.121.892,-

(satu milyar sembilan puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Grafik 4. Belanja Barang Tahun 2023



3. BELANJA MODAL

Pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2023 yaitu:

a. Pagu : Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah).

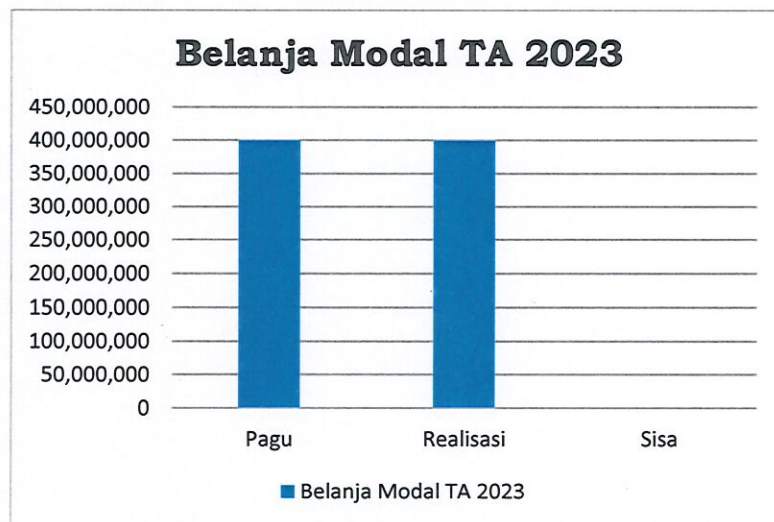
b. Realisasi : Rp. 399.998.198,-

(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

c. Sisa : Rp. 1.802,-

(seribu delapan ratus dua rupiah).

Grafik 5. Belanja Modal Tahun 2023



- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) dan non operasional (biaya perjalanan dinas, pembinaan, tindaklanjut pengaduan dan Reviu RKAKL) sebesar Rp 34.598.131.000
 - Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp 400.000.000
- Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Dalam rangka penanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan penambahan personel Badan Pengawasan. Sehingga diperlukan penambahan alokasi anggaran setiap tahunnya, berikut penambahan alokasi anggaran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir :

Tabel 16. Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

No	Unit	Tahun Anggaran APBN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Badan Pengawasan	Rp 33.650 .412.0 00	Rp 31.972 .336.0 00	Rp 40.093. 817.000 Revisi menjadi 24.745. 576.000	Rp 40.160.74 1.000 Revisi Automatic Adjusment menjadi Rp. 36.960.74 1.000	Rp 78.019.360.0 07 Revisi Automatic Adjustment menjadi Rp. 77.395.003.0 00

BAB IV

PENGAWASAN

A. Program Pembaruan

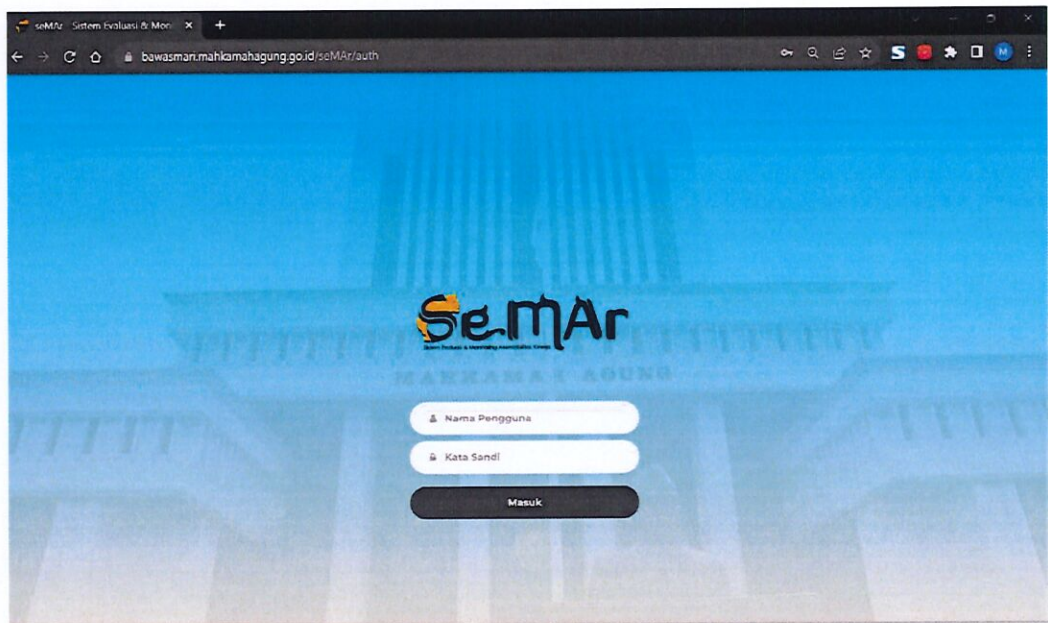
Dalam rangka mewujudkan Misi Mahkamah Agung yang keempat meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan Pengembangan dengan berbasiskan Teknologi Informasi yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi Semar

Salah satu tugas Badan Pengawasan adalah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia. Sebelum tahun 2023 Badan Pengawasan melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas berdasarkan laporan akuntabilitas yang dikirimkan secara manual oleh unit eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding. Demikian juga Pengadilan Tingkat Banding melakukan Evaluasi Akuntabilitas terhadap Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan masing masing.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi biaya dan waktu, Badan Pengawasan berinisiatif melakukan evaluasi berbasis teknologi informasi dengan melakukan pengembangan Aplikasi Semar.

Aplikasi Semar merupakan Sarana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara Elektronik bagi Evaluator pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) oleh Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Unit Eselon 1 pada Mahkamah Agung serta bagi Evaluator Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan untuk menilai SAKIP Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan. Aplikasi Semar dapat juga digunakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan penilaian secara mandiri (*Self Assessment*).



Gambar 1. Tampilan Depan Aplikasi Semar

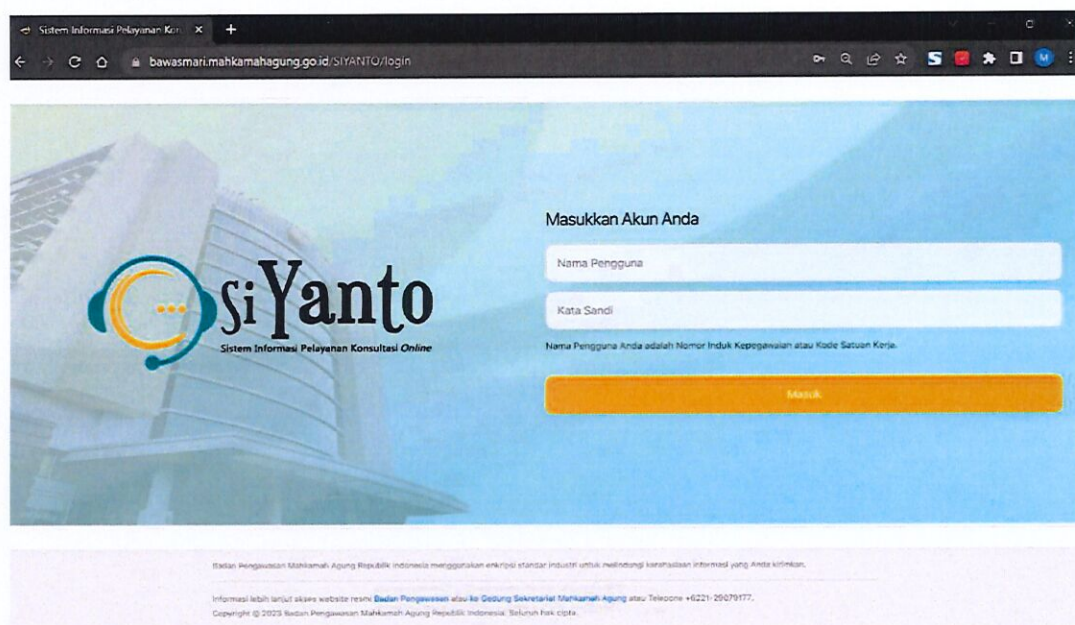
2. Pengembangan Aplikasi SiYanto

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Badan Pengawasan adalah fungsi Konsultasi. Kegiatan konsultasi yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan adalah melalui rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Sehingga banyak satuan kerja yang melakukan konsultasi melalui orang perongan antara Satuan Kerja dengan aparatur Badan Pengawasan.

Untuk meningkatkan fungsi pelayanan konsultasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi Online (SIYANTO) dengan tujuan agar layanan konsultasi dapat dijangkau oleh seluruh satuan kerja setiap saat dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

Aplikasi SIYANTO juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan fungsi *Consulting*. Aplikasi SIYANTO memiliki fungsi *feedback* dan katalis pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aplikasi SIYANTO juga dapat menjadi *Knowledge-database management system* sehingga mengurangi redundansi pertanyaan perihal pengawasan oleh Satuan Kerja dan Unit Kerja lainnya, serta bagi Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat menjadi bahan pembelajaran yang berkelanjutan. Interaksi yang aktif antara Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Satuan Kerja yang bertanya

dapat menjadi Indikator Kinerja yang andal bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Aplikasi SIYANTO terintegrasi dengan *e-Survey* yang pada akhirnya mampu menghasilkan Indeks Kualitas Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai bagian dari Pengukuran Kinerja tiap tahunnya.



Gambar 2. Tampilan Depan Aplikasi SiYanto

3. Pengembangan Aplikasi SIRISMA (Sistem Informasi Risk Manajemen)

Aplikasi ini adalah bahwa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) yang berada di Level Kapabilitas APIP (IACM) level 3, perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko pada tata kelola organisasi, sehingga dapat mempermudah tercapainya tujuan organisasi serta penyelesaian tugas dan fungsi, sesuai perencanaan pembangunan nasional dan menaikkan level IACM Badan Pengawasan.

Aplikasi SIRISMA sebagai sarana digitalisasi penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang mencakup Penetapan konteks, Identifikasi Risiko berikut Sistem Pengendalian internalnya, Analisa Probabilitas dan Dampak Risiko, Upaya Mitigasi Risiko, Pemetaan Risiko, hingga dapat diketahui Nilai Risiko yang diharapkan setelah adanya Manajemen Risiko, sehingga monitoring terhadap Risiko dapat dilaksanakan secara optimal guna pencapaian tujuan organisasi.

Penanggung jawab (user) adalah masing-masing pejabat struktural di Badan Pengawasan (hingga level eselon I).

Manfaat jangka pendek: terimplementasi di Badan Pengawasan, jangka menengah dan Panjang : terimplementasi di eselon 1 dan terintegrasi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, level IACM Badan Pengawasan dapat menuju level 4 dan meningkatkan efisiensi anggaran negara, serta menaikkan level Maturitas SPIP terintegrasi Mahkamah Agung yang saat ini juga dalam level 3, yang juga terkait Indeks Manajemen Risiko.



Gambar 3. Tampilan Depan Aplikasi SIRISMA

4. Pengembangan Aplikasi MaSugi

Amplop di sini adalah amplop yang digunakan untuk mengirimkan surat yang berisi tindak lanjut atas pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan. Dari 3.877 pengaduan yang masuk untuk TA 2022, hanya 1.088 pengaduan yang diajukan lewat aplikasi Siwas, sisanya (sekitar 71,94%) masih ditindaklanjuti tidak melalui aplikasi (jarak jauh dan efisien) akan tetapi via pos/pengiriman surat.

Risiko penggunaan metode pos ini cukup tinggi, yang salah satunya adalah salah alamat pengiriman/tidak sampai ke tangan pelapor. Hal tersebut lah mengapa aplikasi ini masih relevan untuk dibicarakan dan dipertimbangkan di era digitalisasi sekarang ini.



Gambar 4. Tampilan Depan MaSugi

B. Penguatan Sistem Pengawasan

1. Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)

Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) adalah suatu sistem manajemen yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuaan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 40/BP/SK/III/2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) Pada Tahun 2023. Penunjukan 25 (dua puluh lima) Satuan kerja Pelaksana SMAP terdiri dari:

- a. Penunjukan Pembangunan:
 1. Pengadilan Negeri Semarang
 2. Pengadilan Negeri Jambi

3. Pengadilan Negeri Klaten
 4. Pengadilan Agama Bantul
 5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
- b. Penunjukan Evaluasi III:
1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 2. Pengadilan Negeri Makassar
 3. Pengadilan Negeri Denpasar
 4. Pengadilan Negeri Ternate
- c. Penunjukan Evaluasi I:
1. Pengadilan Negeri Medan
 2. Pengadilan Negeri Gorontalo
 3. Pengadilan Negeri Wates
 4. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
 5. Pengadilan Agama Batam
 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
- d. Penunjukan Penilaian Pembangunan:
1. Pengadilan Negeri Bogor
 2. Pengadilan Negeri Pontianak
 3. Pengadilan Negeri Bandung
 4. Pengadilan Negeri Ambon
 5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
 6. Pengadilan Agama Makassar
 7. Pengadilan Agama Banjarmasin
 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dilaksanakan dengan 4 mekanisme:

1. Tinjauan Dokumen adalah instrumen penilaian yang terdiri dari kegiatan pengumpulan dan penilaian dokumen-dokumen yang membuktikan diterapkannya sistem manajemen anti penyuapan pada satuan kerja tersebut.
2. Uji Petik adalah instrumen penilaian dengan menjadikan beberapa kegiatan yang berdasarkan hasil *Risk Register* dari keseluruhan kegiatan satuan kerja sebagai contoh pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan.

Penilaian dilakukan dengan membandingkan isi dokumen dengan pelaksanaan kegiatan dari dokumen tersebut.

3. Wawancara adalah instrumen penilaian yang berisi serangkaian pertanyaan tentang seluruh aktivitas SMAP disertai hasil penilaian masing-masing pertanyaan.
4. *Mystery Shopping* adalah instrumen penilaian dengan cara menugaskan seseorang atau beberapa orang untuk berkunjung kepada satuan kerja dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati dan menilai berjalan atau tidaknya sistem manajemen anti penyuapan, menilai integritas pelayanan pengadilan dan menilai integritas aparaturnya pengadilan.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditetapkan 7 (tujuh) Pengadilan yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam penerapan SMAP.

Tabel 1. Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP

No	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1.	Pengadilan Agama Bantul	A	Pembangunan
2.	Pengadilan Tata Usahas Negara Manado	B	Pembangunan
3.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	B	Pembangunan
4.	Pengadilan Agama Makassar	B	Pembangunan
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A	Evaluasi
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	A	Evaluasi
7.	Pengadilan Negeri Wates	A	Evaluasi

Sedangkan 18 (delapan belas) satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan yang terdiri atas 9 (sembilan) satuan kerja dalam proses Pembangunan ulang, 4 (empat) satuan kerja dalam proses Evaluasi IV dan 5 (lima) satuan kerja dalam proses Evaluasi II.

2. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lain dilakukan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Penanganan Pengaduan serta Penguatan Sistem Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dengan peserta sejumlah 174 peserta.

Tabel 2. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Tempat & Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Kupang Tanggal 22 s/d 25 Agustus 2023	Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang dan Pengadilan Tingkat Pertama	94 Orang	Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama Se-wilayah IV (34 Satker/ Luring) dan diikuti 79 Satker secara daring).
2.	Jakarta Tanggal 7 s/d 10 November 2023	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia	80 Orang	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan

Materi-materi yang disampaikan :

1. Pemuliaan Peradilan
2. Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. Peran Hakim Pengawas Bidang Dalam Peningkatan Pelayanan Publik.
4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana
5. Pedoman Teknis Administasi dan Teknis Peradilan Perdata
6. Administasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
7. Pembuatan Lembar Temuan (LT) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hakim Pengawas Bidang.
8. Arah Pembaharuan Sistem Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
9. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2016.
10. Mekanisme Penanganan Pengaduan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016.
11. Tata Cara Pelaksanaan Cuti Hakim dan Aparatur Peradilan serta Penegakan Disiplin Aparatur Peradilan.
12. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 15/BP/SK/IX/2019.
13. Mekanisme Pembuktian Dalam Pemeriksaan Pengaduan (Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 35/BP/SK/VI/2020).
14. Penegakan Disiplin Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016.
15. Mekanisme Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi SIWAS dan Simulasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Konsultasi Online.

3. Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Dalam merespon atas terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dengan melibatkan unsur Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pegawai yang memeriksa disiplin waktu kerja Aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dengan tujuan agar masuk dan pulang kantor tepat waktu. Selain itu, Satgasus juga mendata para tamu yang akan menghadap ke Hakim Agung dan Aparatur Peradilan dengan tujuan untuk memutus

interaksi antara pihak berperkara dengan Hakim Agung yang memeriksa perkaranya. Kemudian Satgasus juga mengawasi terhadap ketaatan terhadap kode etik Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tidak berlarut-larut.

Satgasus melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja Aparatur Mahkamah Agung melalui akses CCTV online yang terpasang di 9 (sembilan) titik di lingkungan Mahkamah Agung RI. Akses CCTV online ini terpasang di ruang layanan sebanyak 3 CCTV, ruang parkir sebanyak 3 CCTV, ruang layanan (lobby utama) sebanyak 2 CCTV dan 1 CCTV terpasang di pintu masuk gedung Harifin A Tumpa.

Badan Pengawasan MA melalui Satgasus telah melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara tingkas Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik dan manual. Secara elektronik, Satgasus melakukan pemantauan terhadap perkara aktif melalui aplikasi SIAP versi III tahun 2016 terkait proses minutasi dan penyampaian putusan kepada Pengadilan pengaju sehingga diketahui perkara-perkara yang belum selesai minutasi dan putusan belum disampaikan ke Pengadilan pengaju. Secara manual, Satgasus mendatangi para Panitera Muda masing-masing kamar (Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara, dll) terkait perkara-perkara yang belum selesai minutasi dan putusan belum disampaikan ke Pengadilan pengaju.

Kegiatan Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan jam kantor.
2. Pelanggaran terhadap pakaian dinas.
3. Pemantauan penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI.
4. Pemantauan perkara Non Status (Belum dimasukkan ke dalam Aplikasi SIAP).

C. Pengelolaan Sistem Pengawasan

1. Penanganan Pengaduan

Tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah dengan rincian:

Tabel 3. Jumlah Pengaduan Tahun 2023

No.	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.568
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	219
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.351
Total		4.138

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tindaklanjut Penanganan Pengaduan

Tahun 2023

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindaklanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		189
2.	Selesai diproses		3.949
	a. Diperiksa Tim Bawas	103	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	92	
	c. Konfirmasi	152	
	d. Klarifikasi	982	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	82	
	a. Dijawab Surat	1.191	

	b. Pelaksanaan Pemantauan	50	
	h. Diarsipkan	107	
	i. Gabung berkas	1.149	
	j. Dicabut	41	
	Jumlah	3.949	4.138

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan masuk sejumlah 4.138 pengaduan. Pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 189 pengaduan dan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 3.949 pengaduan (95,43%).

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2023 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim:

- Nama : MY
- Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Agama
Watampone
- Hukuman Disiplin : Sanksi berat Pemberhentian tidak
dengan hormat
- Nama : DA
- Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
- Hukuman Disiplin : Sanksi berat Pemberhentian tidak
dengan hormat
- Nama : DS
- Satuan Kerja : Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Barat
- Hukuman Disiplin : Sanksi berat pemberhentian tidak
dengan hormat

Nama : HB

Satuan Kerja : Hakim Non Palu pada Pengadilan
Tinggi Semarang

Hukuman Disiplin : Sanksi berat Pemberhentian tetap
dengan hak pensiun.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2023 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 295 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hukuman Disiplin Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim Ad Hoc	-	-	10	10
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera Muda	3	5	4	12
5.	Panitera Pengganti	12	6	22	39
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita Pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat Struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	10	10	4	24

11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan, sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel berikut

Tabel 6. Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	83
2.	Panitera	5
3.	Sekretaris	2
4.	Panitera Muda	8
5.	Panitera Pengganti	10
6.	Jurusita	3
7.	Jurusita Pengganti	-
8.	Pejabat Struktural	3
9.	Staf	4
10.	Calon Hakim	-
10.	PPNPN	1
Jumlah		119

4. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 174 (seratus tujuh puluh empat) Satuan Kerja, seperti tabel berikut:

Tabel 7. Data Pengawasan Reguler Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	20	36	25	5	86
Peradilan Agama	25	26	24	6	81
Peradilan Militer	-	1	-	1	2
Peradilan TUN	-	2*	2	1	5
Total	45	65	51	13	174

*Note : Pengadilan Pajak 1

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	714	Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan
2.	Administrasi Persidangan	1.039	Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dll
3.	Administrasi Perkara	1.281	Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke

			Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, Keuangan perkara, PNBK. Dll.
4.	Administrasi Umum	1.795	Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, Rumah Dinas, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dll.
5.	Kinerja Pelayanan Publik	919	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), PTSP.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2023 telah melakukan *Monitoring* atas tindaklanjut pemeriksaan Reguler pada 174 (seratus tujuh puluh empat) Satuan Kerja yang dilakukan secara *online* pada Aplikasi Wastitama. Data Hasil Monitoring secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Pengadilan Perkamar Peradilan

No	Jenis Pengadilan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
1.	Pengadilan Tingkat Pertama	78	78	2	5*	163
2.	Pengadilan Tingkat Banding	8	3	-	-	11
Total		86	81	2	3	174

*Note : 1 Pengawasan Reguler Pengadilan Pajak

Tabel 10. Klasifikasi Status Pemantauan Tindakanjutt

No	Bidang	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Manajemen Peradilan	613	59	41	5
2	Pelayanan Publik	778	82	56	6
3	Administrasi Perkara	1.049	139	103	12
4	Administrasi Persidangan	826	90	88	15
5	Administrasi Umum	1.540	181	65	9
Total		4.806	551	357	47

6. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2023 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 87 (delapan puluh tujuh) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 11. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	10	10	15	6	41
Peradilan Agama	10	7	13	8	38
Peradilan	2	3	2	-	7

TUN					
Peradilan Militer	1	-	-	-	1
Jumlah	23	20	30	14	87

Catatan:

Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dengan rincian Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 12. Wilayah I

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	PTUN Pangkal Pinang	13.	PA Tanjung Pandan
2.	PTUN Bandar Lampung	14.	PN Kuala Tungkal
3.	PN Lahat	15.	PN Mentok
4.	PN Solok	16.	PA Mukomuko
5.	PN Palembang	17.	PA Sungai Penuh
6.	PN Bintuhan	18.	PA Sijunjung
7.	PN Tembilahan	19.	PA Krui
8.	PN Rantauprapat	20.	PN Mukomuko
9.	PA Lebong	21.	PA Lubuk Linggau

10.	PA Pematang Siantar	22.	Dilmil I-04 Palembang
11.	PA Pangkalan Kerinci	23.	PA Muara Bungo
12.	PN Pangkal Pinang		

Tabel 13. Wilayah II

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	PTUN Serang	11.	PN Bantul
2.	PN Sleman	12.	PTA Yogyakarta
3.	PN Pandeglang	13.	PTA Jakarta
4.	PN Rangkasbitung	14.	PA Wates
5.	PN Serang	15.	PTTUN Jakarta
6.	PN Wonosari	16.	PN Yogyakarta
7.	PTUN Yogyakarta	17.	PA Bantul
8.	PN Wates	18.	PA Sleman
9.	PT Yogyakarta	19.	PA Wonosari
10.	PA Yogyakarta	20.	PT DKI Jakarta

Tabel 14. Wilayah III

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	PA Parigi	16.	PN Sampit
2.	PA Pontianak	17.	PN Sambas
3.	PA Kandangan	18.	PN Pasangkayu
4.	PA Penajam	19.	PN Kuala Kurun
5.	PA Tilamuta	20.	PN Kutai Barat
6.	PA Tondano	21.	PN Wangi-wangi
7.	PN Ngabang	22.	PTUN Gorontalo
8.	PN Kotamobagu	23.	PA Mamuju
9.	PN Belopa	24.	PN Poso
10.	PN Amurang	25.	PA Belopa
11.	PN Penajam	26.	PA Enrekang
12.	PA Sinjai	27.	PA Poso
13.	PA Malili	28.	PN Andoolo
14.	PN Marabahan	29.	PA Pasarwajo
15.	PN Martapura	30.	PTUN Palangkaraya

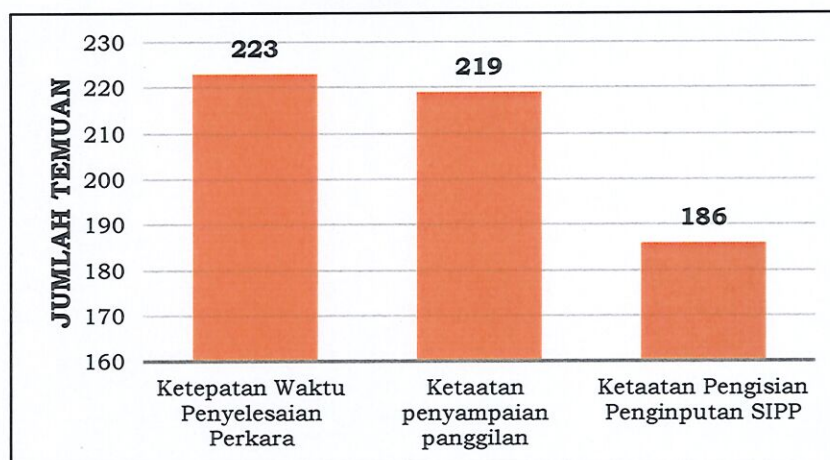
Tabel 15. Wilayah IV

No	Satuan Kerja	No	Satuan Kerja
1.	PN Ende	8.	PN Dompu
2.	PN Merauke	9.	PA Merauke
3.	PA Taliwang	10.	PA Sentani
4.	PN Nabire	11.	PN Sorong
5.	PA Biak	12.	PA Morotai
6.	PA Bima	13.	PA Soasio
7.	PA Sorong	14.	PN Mataram

6.1 Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Hasil temuan audit kinerja bidang penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 adalah sebagaimana grafik batang berikut:

Grafik 1. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2023

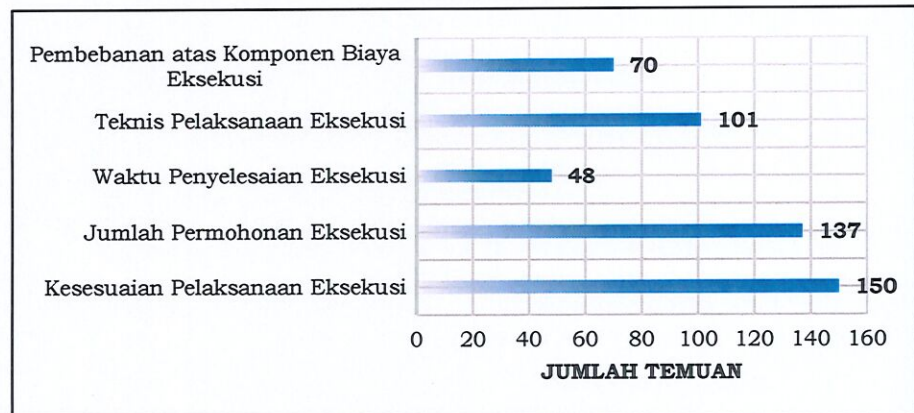


Sebagaimana terlihat pada Grafik, temuan terkait Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya, yakni mencapai 223 (dua ratus dua puluh tiga) temuan (35,51%) dari 628 (enam ratus dua puluh delapan) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru yang mampu memperketat praktik kedisiplinan dalam menyelesaikan perkara oleh seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

6.2. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

Grafik 2. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2023



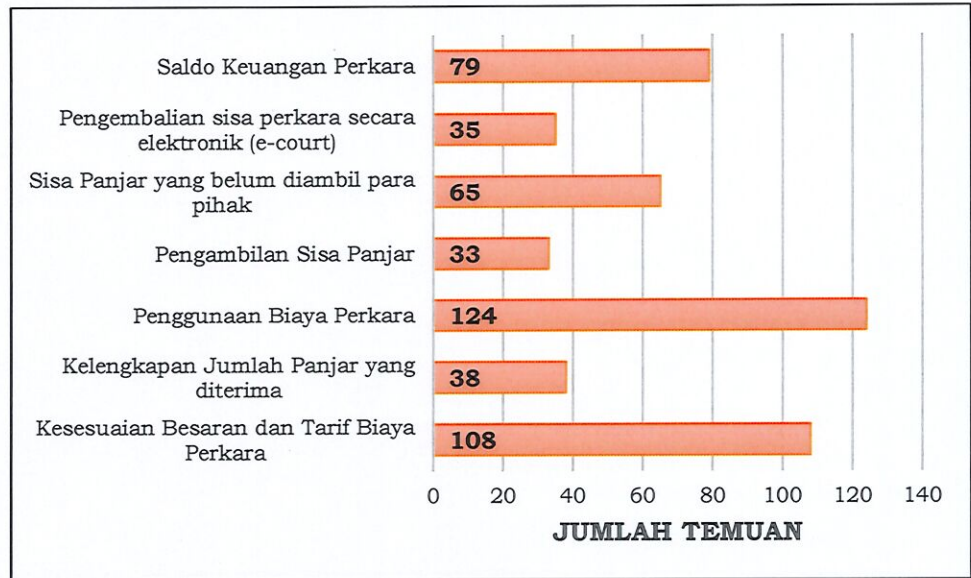
Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi lebih dominan yakni mencapai 150 (seratus lima puluh) temuan (29,64%) dari total 506 (lima ratus enam) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi dalam mengadili.

6.3. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan

Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

Grafik 3. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2023

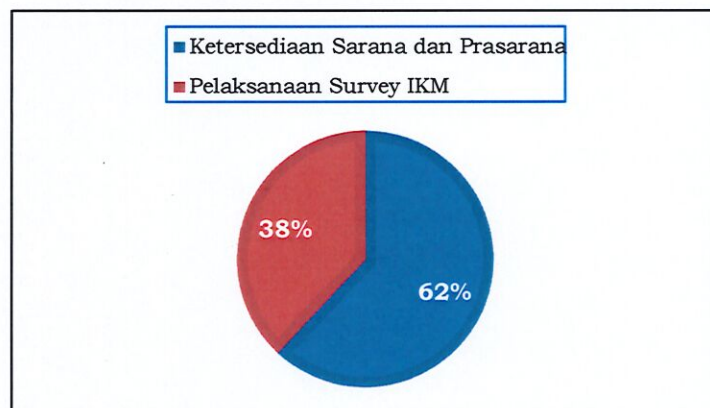


Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait Penggunaan Biaya Perkara paling dominan di antara jenis temuan lainnya, yakni mencapai 124 (seratus dua puluh empat) temuan (25,73%) dari 482 (empat ratus delapan puluh dua) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong tertib dan akuntabelnya penggunaan biaya perkara di seluruh lingkungan peradilan.

6.4. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, adalah sebagaimana grafik batang berikut:

Grafik 4. Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2023



Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan mengilustrasikan bahwa temuan terkait ketersediaan Sarana dan Prasarana terlihat lebih dominan, yakni mencapai 202 (dua ratus dua) temuan (62%) dari total 326 (tiga ratus dua puluh enam) temuan. Hal ini berakibat perlu direncanakannya langkah-langkah guna mendorong sarana dan prasarana yang memadai, baik dari segi kuantitas (yang tersedia) maupun ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja unit Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satker Eselon I pusat dan Peradilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) satker dengan maksud untuk :
 1. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
 2. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
 3. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
 4. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Adapun rekapitulasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No.	PERMENPAN RB No 88 Tahun 2021 SEKMA No. 878 Tahun 2022			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	
			2021	2022
1.	>90 – 100	AA	-	-
2.	>80 – 90	A	3	5
3.	>70 – 80	BB	65	62
4.	>60 – 70	B	6	6
5.	>50 – 60	CC	-	1
6.	>30 – 50	C	-	-
7.	0 – 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2022 terhadap 74 Satuan Kerja yang terdiri dari eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut:

- a. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 5 Satuan Kerja
- b. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori BB (sangat baik) yaitu 62 Satuan Kerja
- c. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori B (baik) yaitu 6 Satuan Kerja.
- d. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori CC (cukup) yaitu 1 Satuan Kerja.

Capaian nilai SAKIP tahun 2021 terhadap 74 Satuan Kerja yang terdiri dari eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut:

- a. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 3 Satuan Kerja

b. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori BB (sangat baik) yaitu 65 Satuan Kerja

c. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori B (baik) yaitu 6 Satuan Kerja.

Tabel 17. Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2022 Satuan Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2023)

No	Nama Satker	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Skor	Kategori
		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Internal		
		30,00	30,00	15,00	25,00		
1.	Badan Urusan Administrasi	23,10	24,00	12,00	20,00	79,10	BB
2.	Kepaniteraan	24,00	24,00	11,55	20,00	79,55	BB
3.	Ditjen Badilum	23,70	23,10	11,85	19,75	79,30	BB
4.	Ditjen Badilag	24,00	24,00	13,05	18,25	80,80	A
5.	Ditjen Badilmiltun	23,10	22,50	10,80	18,25	74,65	BB
6.	Balibang Diklat Kumdil	21,00	21,60	10,10	17,50	70,20	BB
7.	Badan Pengawasan	24,00	22,50	11,55	17,50	75,55	BB
8.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	24,60	23,10	12,60	20,50	80,80	A
9.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	22,20	21,60	11,10	20,00	74,90	BB
10.	Pengadilan Tinggi Medan	21,60	21,00	10,50	17,50	70,60	BB
11.	Pengadilan Tinggi Agama Medan	22,50	21,00	11,25	17,50	72,25	BB
12.	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	22,50	21,00	10,50	17,50	71,50	BB
13.	Pengadilan Tinggi TUN Medan	18,60	20,10	9,00	17,50	65,20	B
14.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	24,60	25,50	12,30	20,50	82,90	A
15.	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	21,00	23,10	11,55	20,50	76,15	BB
16.	Pengadilan Tinggi Padang	23,70	22,50	12,30	19,25	77,75	BB
17.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	23,70	24,60	12,30	20,50	81,10	A
18.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	23,10	24,30	12,00	19,50	78,90	BB
19.	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	23,60	24,00	12,00	19,50	77,10	BB
20.	Pengadilan Tinggi Jambi	23,10	23,10	12,00	19,25	77,45	BB

No	Nama Satker	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Skor	Kategori
		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Internal		
		30,00	30,00	15,00	25,00		
21.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	24,00	24,00	12,00	20,50	80,50	A
22.	Pengadilan Tinggi Palembang	24,60	23,10	11,10	20,50	79,30	BB
23.	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	23,70	21,90	12,30	20,50	78,50	BB
24.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	22,50	23,10	11,10	19,25	75,95	BB
25.	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	23,10	24,60	12,30	21,25	79,45	BB
26.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	24,00	22,20	12,30	19,25	77,75	BB
27.	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	22,20	23,10	11,85	19,25	76,40	BB
28.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	24,00	24,00	12,00	20,00	80,00	BB
29.	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	21,60	24,00	10,50	17,50	73,60	BB
30.	Pengadilan Militer Utama	22,50	21,00	11,25	17,50	72,25	BB
31.	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	21,00	21,00	11,70	18,75	72,45	BB
32.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	18,00	16,20	7,80	13,75	55,75	CC
33.	Pengadilan Tinggi Bandung	22,20	22,20	11,10	17,50	73,00	BB
34.	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	22,50	21,00	11,10	17,50	72,10	BB
35.	Pengadilan Tinggi Banten	22,20	21,00	11,10	18,00	72,30	BB
36.	Pengadilan Tinggi Agama Banten	20,10	20,70	9,75	14,25	64,80	B
37.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	21,06	21,58	10,35	17,05	70,04	BB
38.	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	21,00	21,60	11,25	16,75	70,60	BB
39.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	24,00	23,10	11,55	18,00	76,65	BB
40.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	23,10	24,00	11,70	17,50	76,30	BB
41.	Pengadilan Tinggi Surabaya	22,50	21,00	10,50	19,25	73,25	BB

No	Nama Satker	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Skor	Kategori
		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Internal		
		30,00	30,00	15,00	25,00		
42.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	23,10	23,40	12,00	18,75	77,25	BB
43.	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	21,60	22,50	11,25	19,50	74,85	BB
44.	Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	18,00	19,50	9,30	18,00	65,40	B
45.	Pengadilan Tinggi Denpasar	21,00	21,00	11,25	18,25	71,50	BB
46.	Pengadilan Tinggi Pontianak	21,00	22,50	12,00	18,75	74,25	BB
47.	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	22,50	22,50	10,80	18,75	74,55	BB
48.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	21,00	21,00	10,80	19,50	72,30	BB
49.	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur	23,10	23,10	10,80	18,25	75,25	BB
50.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	21,00	21,60	10,80	18,00	71,40	BB
51.	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	21	22,50	10,50	18,75	72,75	BB
52.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	23,10	21,60	11,85	19,50	76,05	BB
53.	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah	21,60	23,10	10,50	17,50	72,10	BB
54.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	21,00	21,00	11,70	17,50	71,20	BB
55.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	21,60	24,00	11,85	20,00	77,45	BB
56.	Pengadilan Tinggi Manado	21,60	22,50	11,25	15,00	70,35	BB
57.	Pengadilan Tinggi Agama Manado	23,10	24,00	11,25	16,25	74,60	BB
58.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	21,00	21,00	12,00	18,25	72,25	BB
59.	Pengadilan Tinggi Agama Palu	21,60	20,40	10,80	17,50	70,30	BB
60.	Pengadilan Tinggi Kendari	21,00	21,00	11,25	18,25	71,50	BB
61.	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	21,00	21,00	11,55	18,25	71,80	BB
62.	Pengadilan Tinggi Makassar	21,00	21,00	9,30	14,50	65,80	B

No	Nama Satker	Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Skor	Kategori
		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Internal		
		30,00	30,00	15,00	25,00		
63.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	21,60	21,60	10,35	19,25	72,80	BB
64.	Pengadilan Tinggi TUN Makassar	21,00	21,00	9,60	17,50	69,10	B
65.	Pengadilan Tinggi Mataram	21,60	21,90	11,85	18,25	75,70	BB
66.	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	21,60	22,20	10,50	18,00	72,30	BB
67.	Pengadilan Tinggi Kupang	22,50	22,50	11,55	16,75	73,30	BB
68.	Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur	23,70	24,60	11,10	19,50	78,90	BB
69.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	21,60	21,00	10,50	17,50	70,60	BB
70.	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	21,00	21,00	11,25	12,00	65,25	B
71.	Pengadilan Tinggi Ambon	21,00	21,90	10,50	17,50	70,90	BB
72.	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	22,50	22,50	11,25	15,00	71,25	BB
73.	Pengadilan Tinggi Jayapura	21,60	21,00	11,55	17,50	71,65	BB
74.	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	24,00	21,90	12,75	18,00	76,65	BB
RATA-RATA		22,17	22,25	11,22	18,25	73,89	BB
JUMLAH		1640,46	1646,68	830,45	1350,30	5467,89	

8. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM)

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung melalui surat nomor 807/SEK/OT.01.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 hal Permintaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM, diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 18. Daftar Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM
Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Lingkungan Peradilan Umum	
	a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	18
	b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	29
2	Lingkungan Peradilan Agama	
	a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	25
	b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	65
3	Lingkungan Peradilan Militer	
	a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	1
	b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	3
4	Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
	a. Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	1
	b. Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	8
Total Unit Kerja yang diajukan		150

Hasil evaluasi zona integritas tahun 2023 oleh Tim Penilai Internal (TPI), Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 1016/SEK/OT.01.1/5/2023 tanggal 23 Mei 2023 mengusulkan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja atau sebanyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dari total unit kerja yang dievaluasi sebagai calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian:

1. 60 (enam puluh) calon unit kerja berpredikat WBK.
2. 13 (tiga belas) calon unit kerja berpredikat WBBM;

Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut:

Tabel 19. Evaluasi dan Penilaian TPI

Jenis Predikat	Jumlah Total Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon Unit Kerja Berpredikat WBK	105	60	45
Calon Unit Kerja Berpredikat WBBM	45	13	32
Total Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	150	73	77

8.1 Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Sekretaris Mahkamah Agung melalui Surat Nomor 1160/SEK/OT.01.1/6/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2023 menetapkan rencana kerja dan jadwal Pelaksanaan setiap tahapan evaluasi dengan supervisi langsung dari Kemenpan RB.

8.1.1 Seleksi Administrasi

Sesuai Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 295/BP.1/OT.01.2/7/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2023 meluluskan seluruhnya yakni 60 (enam puluh) calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni *Desk Evaluation* – Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung.

8.1.2 Desk Evaluation – Analisis Dokumen LKE Dan Data Dukung

Sesuai Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1123/BP/OT.01.2/7/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Hasil Penilaian (*Desk Evaluation*) – Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri Tahun 2023, sebanyak **45 (empat puluh lima)** unit kerja atau sebanyak **75% (tujuh puluh lima persen)**

dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni *Desk Evaluation* – Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 03 Agustus 2023.

8.1.3 Desk Evaluation – Wawancara

Sesuai Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1330/BP/OT.01.2/9/2023 tanggal 08 September 2023 tentang Hasil Penilaian (*Desk Evaluation*) – Wawancara pada satuan kerja Calon Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri Tahun 2023, sebanyak **39 (tiga puluh sembilan)** atau **65% (enam puluh lima persen)** dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023.

8.1.4 Verifikasi Lapangan

Berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan pada 39 (tiga puluh sembilan) calon unit kerja berpredikat WBK, seluruh informasi yang diperoleh akan disampaikan pada Panel Final TPI Bersama TPN yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023.

8.1.5 Panel Akhir Bersama TPN

Berdasarkan hasil rapat Panel Akhir Bersama TPN diperoleh rekomendasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) calon unit kerja atau sebanyak **55% (lima puluh lima persen)** direkomendasikan mendapatkan predikat WBK.

8.2 Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM

Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan Evaluasi terhadap 45 (empat puluh lima) Satuan Kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung melalui surat nomor 807/SEK/OT.01.1/4/2023 tanggal 26 April 2023.

Tahapan evaluasi terdiri dari seleksi Administrasi dan Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung terhadap 45 (empat puluh lima) satuan kerja yang diusulkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,

TPI menetapkan 13 (tiga belas) satuan kerja yang dinyatakan lolos administrasi dan memenuhi nilai minimal berdasarkan analisis dokumen LKE dan data dukung.

Hasil tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku Koordinasi TPI kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian PAN RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1016/SEK/OT.01.1/5/2023 tanggal 23 Mei 2023.

9. Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung
www.siwas.mahkamahagung.go.id
2. Layanan pesan singkat / SMS / WhatsApp.
3. Surat elektronik (email).
4. Faksimile.
5. Telepon.
6. Meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI.
7. Surat dan atau.
8. Kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi seluruh pengaduan baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2023 dari pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI mengenai pungli di Pengadilan sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) pengaduan.

Dari 8 Pengaduan tersebut 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Arsip | : 1 Pengaduan |
| - Gabung Berkas | : 6 Pengaduan |
| - Delegasi Pemeriksaan | : 1 Pengaduan |
| - Jawab surat | : 6 Pengaduan |
| - Klarifikasi | : 16 Pengaduan |

- Konfirmasi : 8 Pengaduan
- Pengiriman dan Pembuatan Memorandum : 1 Pengaduan
- Pemeriksaan oleh Tim Badan Pengawasan : 11 Pengaduan

D. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 20. Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP
Tahun 2023**

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<p>Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu:</p> <p>a. Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2022 dilaksanakan pada bulan Januari 2023</p> <p>b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada bulan Juli 2023.</p> <p>c. Laporan Keuangan Semester III Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023</p> <p>Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 11 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu pada bulan Januari dan Desember 2023</p>
2.	Reviu RKA K/L	<p>Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2024, Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) atas kualitas penyusunan Pagu Anggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu RKA K/L Tahun 2023 dilaksanakan 2 x yaitu :</p> <p>a. Reviu RKA K/L Pagu Indikatif MA Tahun 2024 yang dilaksanakan bulan Juni 2023;</p> <p>b. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi MA Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.</p>
3.	Reviu Pelaksanaan	Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi

Anggaran PBJ

belanja telah mencapai 91,95% dari rencana penyerapan dengan rincian sebagai berikut: Atas total realisasi sebesar Rp10.951.961.206.183,00 (91,95%) per 11 Desember 2023 tersebut dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp11.555.880.329.000,00.

Perbandingan rencana dan realisasi kontrak pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

No	Posisi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket	Nilai (Rp)
1	Target s.d. Triwulan IV Tahun 2023		
	a. PBJ melalui Swakelola*	9.383	680.518.553.058
	b. PBJ melalui Penyedia*	494	1.572.108.823.143
	• Tender Cepat/Tender/Seleksi/Seleksi Dini		
	• E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung	3.481	1.031.482.423.759
	c. Pengadaan yang dikecualikan*	201	8.222.174.000
	Jumlah Target PBJ s.d. Triwulan IV 2023	13.559	3.292.331.973.960
2	PBJ Tender Cepat/Tender/Seleksi yang sudah dilakukan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya**	11	29.502.431.000
3	PBJ sudah tanda tangan kontrak/dokumen setara kontrak***	2.546	2.109.678.804.345

Rincian progres pembayaran kontrak kerja sebagai berikut:

No.	Realisasi Fisik	Jumlah Paket	Nilai Kontrak (Rp)
1.	0%	198	70.187.798.448
2.	1% - 25%	4	47.445.485.000
3.	26% - 50%	52	154.476.411.711
4.	51% - 75%	108	477.580.623.152
5.	76% - 99%	186	350.172.404.700
6.	100%	1.998	1.009.816.081.334
	Jumlah	2.546	2.109.678.804.345

Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam reuiu PA PBJ Triwulan IV sebagai berikut:

- Progres fisik yang rendah pada pekerjaan konstruksi.
- Pengadaan tanah yang masih minim realisasi karena perencanaan yang kurang memadai.
- Kepatuhan terkait dengan ketentuan minimum PDN 40%.
- Belum dibentuknya Pokja atau Tim P3DN.
- PPK belum seluruhnya melakukan penginputan ke dalam aplikasi SISWA P3DN maupun E-Sadewa dalam rangka monitoring pelaksanaan pengadaan.

4.	Reviu Revisi Anggaran	<p>Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan sesuai permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu Penghematan Anggaran MA Th. 2023 yang dilaksanakan di bulan Juli 2023 yang menyebabkan pengurangan Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp344.771.293.000,- b. Reviu Revisi Anggaran terkait revisi pengurangan alokasi anggaran Mahkamah Agung RI T.A. 2023 sebesar Rp5.560.682.000,- c. Reviu Perubahan Anggaran/Perubahan Peruntukan Alokasi Anggaran Blokir (<i>automatic adjustment</i>) TA 2023 yang dilaksanakan bulan Agustus 2023 sebesar Rp541.917.161.000,00
5.	Reviu RKBMN	<p>Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun 2023 dilaksanakan 2 x yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) MA RI reguler untuk Tahun 2025 b. Revisi atas RKBMN MA RI Tahun 2024 berupa Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor, Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Rumah Negara, Tanah untuk Bangunan Rumah Negara dan Reviu Pengadaan AADB;
6.	Reviu atas Penerimaan PNB	<p>Reviu atas Penerimaan PNB bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNB telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan. Reviu atas Penerimaan PNB dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2023.</p>
7.	Reviu Hibah	<p>Reviu Hibah pada bulan November tahun 2023 dilaksanakan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadilan Agama Kota Kediri b. Pengadilan Agama Kuala Kurun c. Pengadilan Agama Sampit
8.	<i>Liaison Officer</i> (LO)	<p><i>Liaison Officer</i> /Pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI</p> <p>Sampai dengan semester II tahun 2023, Badan Pengawasan MA RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi <i>Liaison Officer</i> Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berdasarkan Surat Tugas Anggota III BPK RI Nomor 18/ST/V-

		<p>XVI.1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 24 Mei 2023 bertempat di Wilayah DKI Jakarta, Aceh, Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Dalam rangka <i>Liaison Officer</i>/Pendampingan atas kegiatan pemeriksaan tersebut Kepala Badan Pengawasan telah menerbitkan Surat Tugas nomor 44/BP/ST/I/2023 dan 45/BP/ST/I/2023 tanggal 19 Januari 2023.</p> <p>2. Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan pendampingan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara, dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 22 Desember 2023 pada satuan kerja di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan RI Nomor 826/BP/ST/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.</p>
9.	Probity Audit	<p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa.</p> <p>Probity Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakkan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Pada tahun 2023, probity audit dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali penugasan pada 16 (enam belas) satuan kerja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadilan Agama Bintuhan b. Pengadilan Agama Kasongan c. Pengadilan Agama Muaradua d. Pengadilan Agama Mukomuko e. Pengadilan Agama Sungai Raya f. Pengadilan Agama Pagar Alam

		<ul style="list-style-type: none"> g. Pengadilan Agama Rumbia h. Pengadilan Agama Sibuhuan i. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah j. Pengadilan Agama Gedong Tataan k. Pengadilan Agama Pulang Pisau l. Pengadilan Agama Tais m. Pengadilan Negeri Kaimana n. Pengadilan Negeri Meureudu o. Pengadilan Negeri Rantau p. Badan Urusan Admnistrasi, dilaksanakan 2 (dua) kali penugasan dengan objek pemeriksaan yang berbeda
10.	Audit PBJ	<p>Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Audit PBJ dilaksanakan pada 16 (enam belas) satuan kerja, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadilan Tinggi Denpasar b. Pengadilan Negeri Gedong Tataan c. Pengadilan Agama Pangkalan Balai d. Pengadilan Agama Prabumulih e. Pengadilan Agama Sukadana f. Pengadilan Agama Nanga Pinoh g. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung h. Pengadilan Negeri Bekasi i. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu j. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang k. Pengadilan Tinggi Palu l. Pengadilan Agama Pulau Punjung m. Pengadilan Negeri Pulau Punjung n. Pengadilan Negeri Namlea o. Pengadilan Agama Suwawa p. Badan Urusan Administrasi
11.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	<p>Penjaminan Kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP</p>

		yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI
--	--	--

E. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindaklanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2023 Badan Pengawasan telah melakukan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester I Tahun 2023 atas 44 laporan yang terdiri dari 731 temuan dengan 1.714 rekomendasi sebesar Rp 40.890.100.321,07 dengan status sebagai berikut:

1. Tindaklanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.703 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 38.246.261.493,01 (93,53%).
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 2.643.838.828,06 (6,47%).

Dengan demikian penyelesaian tindaklanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2023 telah selesai yaitu sebanyak 1.714 rekomendasi atau sebesar 100%.

F. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2023 oleh masyarakat umum dan satuan kerja yang secara langsung menggunakan aplikasi SIWAS sebagai berikut:

Tabel 21. Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Aplikasi SIWAS MA-RI Tahun 2023

No	Jenis Laporan	Jumlah
1.	Pelapor secara mandiri	868
2.	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	441
3.	Inisiatif Tingkat Banding	42
TOTAL		1.351

G. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut

Tabel 22. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2023

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Capaian	Target (LHP/Ke giatan)	Persentase
	I	II	III	IV			
Pemeriksaan Kasus	39	131	31	11	212	175	121,14%
Pemeriksaan Reguler	45	66	52	11	174	167	104,19%
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	27	55	28	15	125	99	126,26%
Pemeriksaan Monitoring	45	65	51	13	174		
Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	23	20	30	14	87	77	112,99%
Pemeriksaan Kepegawaian	-	3	-	-	3	3	100%

Probity Audit PBJ	10	2	3	1	16	15	106,67%
Audit PBJ	7	1	9	1	18	13	138,46%
Pemeriksaan Lintas Provinsi / Tujuan Tertentu / Cek Fisik / Saber Pungli / Investigasi / Unit Intelijen / SIDAK	7				7	7	100%
TLHP BPK	10				10	10	100%
LO Pendampingan	9				9	9	100%
IACM	3				3	4	75%
Reviu PIPK	2				2	4	50%

Catatan: Dari capaian, Realisasi Anggaran (98,56%)(SP2D)

Pagu : Rp 77.395.003.000,-

Realisasi : Rp 76.279.558.687,-

Sisa : Rp 1.115.444.313,-

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan tahunan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas KKN Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2023, laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dan sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, atas hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengelolaan

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang, yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dan tenaga PPNPN berjumlah 13 (tiga belas) orang.

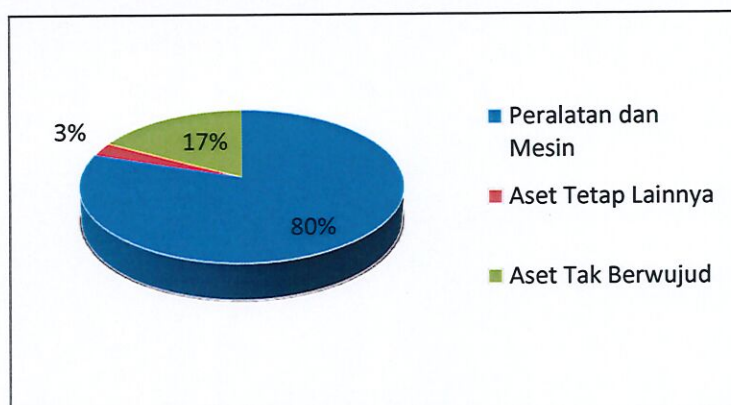
Pada tahun 2022, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang, yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 66 (enam puluh enam) orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang dan tenaga PPNPN berjumlah 15 (lima belas) orang.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 dikelompokkan :

➤ 2.376 unit peralatan dan mesin	Rp 15.002.253.878
➤ 2.290 unit aset tetap lainnya	Rp 535.403.685
➤ 104 unit aset tak berwujud	Rp 461.260.800
Total pengelolaan sarana dan prasarana	Rp 15.998.918.363

Grafik 1. Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan



Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2023, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan DIPA tahun 2023 Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan anggaran DIPA tahun anggaran 2023 adalah 23 Unit dengan Total **Rp 399.998.198** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Barang Milik Negara

No	Uraian	Volume	Nilai
1.	Alat Reproduksi (Penggandaan) Lainnya	2	Rp 4,742,000
2.	Lemari Display	1	Rp 3.700.000
3.	Alat Pemotong Kertas	3	Rp 45.750.000
4.	LCD Projector/Infocus	1	Rp 6.400.000
5.	Meja Komputer	1	Rp 8.960.000
6.	Sofa	1	Rp 27.249.000
7.	Meubelair Lainnya	1	Rp 8.169.000
8.	Televisi	2	Rp 7.461.500
9.	Equalizer	1	Rp 8.600.000
10.	Loudspeaker	6	Rp 36.230.000

11.	Vertikal Blind	1	Rp 19.508.000
12.	Kabel	1	Rp 3.683.998
13.	Audio Amplifier	1	Rp 6.800.000
14.	Power Amplifier	1	Rp 28.900.000
15.	P.C Unit	1	Rp 19.200.000
16.	Auto Switch/Data Switch	1	Rp 11.086.200
17.	Peralatan Komputer Lainnya	6	Rp 12.210.000
18.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Rp 22.716.000
19.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp 5.300.000
20.	Router	6	Rp 24.000.000
21.	Switch Rak	1	Rp 4.500.000
22.	Wireless Access Point	29	Rp 91.350.000
23.	Switch	1	Rp 5.242.500
	TOTAL	79	Rp399.998.198

c. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07-0.663136/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan jumlah PAGU (REVISI KE - 9 tanggal 20 Desember 2023) sebesar Rp. 77.395.003.000,- terdiri dari:

BELANJA PEGAWAI

Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2023 yaitu:

- **Pagu** : **Rp 42.396.872.000 (100%)**
(empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- **Realisasi** : **Rp 42.375.551.381 (99,95%)**
(empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- **Sisa** : **Rp 21.320.619 (0,05%)**
(dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

d. Penanganan Pengaduan

Tahun 2023 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 4.138 pengaduan, dengan rincian :

Tabel 2. Jumlah Pengaduan Tahun 2023

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.568
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	219
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.351
Total		4.138

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tindaklanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindaklanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		189
2.	Selesai diproses		3.949
	a. Diperiksa Tim Bawas	113	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	92	
	c. Konfirmasi	152	

	d. Klarifikasi	982	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	82	
	c. Dijawab Surat	1.191	
	d. Pelaksanaan Pemantauan	50	
	h. Diarsipkan	107	
	i. Gabung berkas	1.149	
	j. Dicabut	41	
	Jumlah	3.949	4.138

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan masuk sejumlah 4.138 pengaduan. Pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 189 pengaduan dan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 3.949 pengaduan (95,43%).

e. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2023 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 295 aparat peradilan.

Tabel 4. Hukuman Disiplin Tahun 2023

No	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim Ad Hoc	-	-	10	10
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera Muda	3	5	4	12

5.	Panitera Pengganti	12	6	22	39
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita Pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat Struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	10	10	4	24
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

f. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan pada Tahun 2023 telah melakukan pemeriksaan reguler pada 174 (seratus tujuh puluh empat) Satuan Kerja. Pemeriksaan Reguler pada lingkungan peradilan umum untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 86 (delapan puluh enam) Satuan Kerja, peradilan agama untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 81 (delapan puluh satu) Satuan Kerja, peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, dan IV berjumlah 2 (dua) Satuan Kerja, dan peradilan TUN untuk wilayah I, II, III dan IV berjumlah 5 (lima) Satuan Kerja.

g. Pemantauan (Monitoring)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2023 telah melakukan *Monitoring* atas tindaklanjut pemeriksaan Reguler pada 174 (seratus tujuh puluh empat) Satuan Kerja yang dilakukan secara online pada Aplikasi Wastitama.

h. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2023 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara,

Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 87 (delapan puluh tujuh) Satuan Kerja sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pelaksanaan Audit Kinerja Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	10	10	15	6	41
Peradilan Agama	10	7	13	8	38
Peradilan TUN	2	3	2	-	7
Peradilan Militer	1	-	-	-	1
Total					87

B. Rekomendasi

Badan Pengawasan telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik, selain itu Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maka perlu dilaksanakan dan ditingkatkan kegiatan rutin antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)
2. Pemeriksaan Audit Kinerja
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengembangan Aplikasi Sitem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI)

Demikian Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Laporan ini terwujud atas kerja sama yang baik mulai

dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staff yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan.